

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN PADANG LAWAS
(Studi Kasus : Sektor Pajak Restoran/Rumah Makan)**

SKRIPSI

Oleh :

ALI HASAN SIREGAR

NPM : 11 852 0003

Program Studi Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)**

DI KABUPATEN PADANG LAWAS

(Studi Kasus: Sektor Pajak Restoran/Rumah Makan)

SKRIPSI

OLEH

ALI HASAN SIREGAR

11 852 0003

Program Studi Administrasi Publik

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Padang Lawas

Nama : Ali Hasan Siregar

NPM : 11 852 0003

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh,

Komisi Pembimbing

Drs. H. M. Husni Thamrin Nasution, Msi Drs.H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelas sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutif dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2017



ALI HASAN SIREGAR

11 852 0003

ABSTRAK

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Oleh :

ALI HASAN SIREGAR

11 852 0003

Program Studi Administrasi Publik

PAD merupakan salah satu elemen terpenting pembentuk APBD, bila PAD meningkat maka dengan kemungkinan besar APBD juga ikut meningkat. Karena itu, perlu adanya suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama PAD. Hal ini dilakukan karena dari tahun ke tahun sumbangsih PAD Padang Lawas terhadap APBD mengalami dinamika, yaitu terkadang turun dan terkadang naik. Rendah atau masih kecilnya sumbangan PAD tersebut perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan. Pendek kata, perlu adanya suatu strategi baru ataupun pengembangan strategi yang telah ada untuk terus mendongkrak PAD Kabupaten Padang Lawas. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak rumah makan, dan untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak rumah makan di Kabupaten Padang Lawas.

Analisa data yang digunakan penulis dalam ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti yang telah tersedianya perda SOP, kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi. Kemudian meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasaran yang sudah tidak memadai.

Kata Kunci : Strategi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas

ABSTRACT

STRATEGY FOR INCREASING REAL REGIONAL INCOME (PAD) IN DISTRICT PADANG LAWAS

By:

ALI HASAN SIREGAR
11 852 0003

Study Program Publik Administration

PAD is one of the most important elements of APBD formation, if the PAD increases then it is likely that APBD will also increase. Therefore, it is necessary to have a planned and systematic effort to continue to improve the key sectors of PAD. This is done because from year to year the contribution of Padang Lawas to APBD experiencing dynamics, that is sometimes down and sometimes up. The low or small contribution of the PAD needs to be the attention of the interested parties. In short, the need for a new strategy or the development of existing strategies to continue to boost PAD Padang Lawas. One way is to intensify the PAD-building sectors, one of which is from the tax sector.

The purpose of this study is to find out the Government's strategy in increasing the Local Own Revenue (PAD) from the restaurant tax sector, and to find the factors that inhibit and support the increase of Local Own Revenue from the restaurant tax sector in Padang Lawas Regency.

Analysis of the data used by writer in this research is qualitative descriptip research that is used to research on natural object condition and done to independent variable that is without making comparison or connect with other variable.

Based on this research, the result of the strategy is to optimize the existing internal strengths such as the availability of SOP regulations, the quality of apparatus resources and high employee commitment. Then minimize internal weakness factors such as functional technical capability, un standardized workload and inadequate means of infrastructure.

Keywords: Strategy, Increase of Padang Lawas District Original Income

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ali Hasan Siregar lahir di Tanjung Medan pada tanggal 24 Desember 1991 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Abdur Rahman Siregar dan Ibu Rospita Sihombing. Penulis sekarang bertempat tinggal di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 1002 Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas lulus pada tahun 2004, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SLTP/SMP Madrasah Tsanawiah Negeri lulus pada tahun 2007, dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Barumon Kabupaten Padang Lawas lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan strata 1 ke Universitas Medan Area (UMA) Kampus 1 pada Tahun 2011, sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area (UMA) Kampus 1 Jl. Kolam No. 1 Medan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan YME, karena dengan rahmat dan ridho-Nyalah penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini juga, penulis tidak lupa mengkhaturkan ribuan terima kasih kepada para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran intelektual bagi para mahasiswa terkhususnya bagi penulis sendiri. Semoga keikhlasan ilmu yang para dosen berikan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini merupakan awal dari penyempurnaan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Strata-1 konsentrasi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Adapun judul yang penulis ajukan untuk skripsi ini adalah “**Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas**”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Bapak Drs.H. M. Husni Thamrin Nasution, MSi selaku pembimbing I
3. Bapak Drs. H Irwan Nasution S.Pd, M.Ap selaku pembimbing II
4. Bapak Bimby Hidayat, S.Sos, MA selaku sekretaris.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
6. Seluruh staf Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas.
7. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada ayahanda tercinta Abdur Rahman Siregar dan Ibunda Tercinta Rospita Sihombing atas segala pengorbanan, perjuangan, do'a, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
8. Adik Irpan Efendi Siregar dan Rahma Safitri Khotmaidah Siregar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat yang luar biasa.
9. Teman – teman satu angkatan penulis yang selalu mengisi kesaharian penulis dalam diskusi dan canda tawa yang memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis akan serahkan segalanya, mudah – mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Medan, Juni 2017

Penulis

ALI HASAN SIREGAR

11 852 0003

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Pemerintah Daerah	8
2.2. Teori Strategi	8
2.3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.4. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
2.5. Pajak Daerah.....	18
2.6. Retribusi Daerah.....	22
2.7. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	28
BAB III. METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3. Informan Penelitian	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.5. Teknik Analisis Data	36

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas.....	38
4.1.2. Visi dan Misi	38
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	41
4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas	42
4.1.5. Uraian Tugas Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas	45
4.2. Gambaran Umum Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas....	61
4.2.1. Dasar Hukum Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas.....	61
4.2.2. Terminologi Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Padang Lawas	61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan negara yang bertujuan untuk adaptif terhadap kebutuhan daerah berlanjut dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Pajak dan Retribusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Dalam penjelasan umum UU Pajak dan Retribusi Daerah terdapat pemikiran dasar yang melatarbelakangi dibentuknya UU. Jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang lama sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Selain itu, dalam kenyataan, daerah banyak merumuskan pajak dan retribusi daerah yang bertentangan dengan prinsip efisiensi, kemudahan investasi, mobilisasi penduduk dan barang antar daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten / kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sejalan dengan reformasi total, di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, dimana Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1974, yaitu tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun seiring perjalanan waktu dan juga dinamika dalam sistem pemerintahan maka UU No. 22 tahun 1999 juga diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang hal yang sama yaitu pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengarahkan pembentukan dan penyusunan 3 (tiga) bentuk daerah otonom, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing berdiri sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan satu sama lain tidak mempunyai hubungan hirarkis. Maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten dan daerah kota, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi

hanya diperkenalkan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini.

Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Padang Lawas. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD lainnya adalah dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain penerimaan yang sah.

PAD merupakan salah satu elemen terpenting pembentuk APBD, bila PAD meningkat maka dengan kemungkinan besar APBD juga ikut meningkat. Karena itu, perlu adanya suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama PAD. Hal ini dilakukan karena dari tahun ke tahun sumbangsih PAD Padang Lawas terhadap APBD Kabupaten Padang Lawas mengalami dinamika, yaitu terkadang turun dan terkadang naik. Rendah atau masih kecilnya sumbangan PAD tersebut perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan. Pendek kata, perlu adanya suatu strategi baru ataupun pengembangan strategi yang telah ada untuk terus mendongkrak PAD Kabupaten Padang Lawas. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak. UU No. 12 Tahun 1994 diantaranya menjelaskan bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dan kekuasaan negara, wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka penyalenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonom daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagaimana yang ada pada setiap kondisi masyarakat secara umum bahwa pajak merupakan sesuatu yang memberatkan. Pajak oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara. Karena masyarakat kurang dapat memahami bahwa dari pajak yang mereka bayarkan pada akhirnya nanti akan dinikmati atau dirasakan oleh mereka sendiri. Artinya jika masyarakat membayar pajak oleh pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain. Kekurangpahaman masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan sehingga tidak dapat memperoleh referensi yang cukup mengenai masalah perpajakan terutama pajak bumi dan bangunan. Padahal pemerintah dengan berbagai kemudahan telah mengatur pula dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya pemerintah memberikan fasilitas yang salah satunya karena Pajak Restoran sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah maka dirasa perlu untuk menempatkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah masyarakat. Tempat-tempat yang lebih mudah misalnya bank, kantor pos dan giro, kelurahan dan lain-lain.

Rendah atau tingginya penerimaan sektor pajak tentu akan berimbas pada laju pembangunan daerah, karena telah diketahui pembiayaan diambilkan dari pendapatan asli daerah dan pos-pos penerimaan lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Restoran?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peningkatan pendapatan asli daerah sektor pajak rumah makan di Kabupaten Padang Lawas?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang maka penelitian ini hanya membahas strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Rumah Makan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak rumah makan.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak rumah makan di Kabupaten Padang Lawas.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari peneliti yang dilakukan ini adalah :

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan bagaimana strategi meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten padang lawas.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah Daerah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Menurut Sudjaipul Rahman (2004: 150) mengatkan bahwa: “Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsife untuk memaknai pembangunan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie (2007: 44)“Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah”.

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.2 Teori Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai

sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dibawah ini ada beberapa pengertian strategi menurut para ahli :

- Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan –tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.
- Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
- Hamel dan Prahalad (1995:31) bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya .oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal,

pada saat organisasi tidak memiliki konsisten antara apa yang dikatakan, apa yang diusahakan dan apa yang dilakukan.

2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Salah satu indikator penting dari kewenangan di bidang keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam sistem negara yang manapun di dunia ini, hampir tidak dijumpai kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan asli daerah. Dalam bentuk kasus transfer dana dari pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Menurut D.Rianto Nugroho, (2000: 65) “Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- e. Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan;
- f. Jasa giro;
- g. Pendapatan bunga;
- h. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- i. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut D.Rianto Nugroho, (2000: 34) Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Tjanya Supriatna, (2001: 74)“Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD”.

Dari uraian pendapatan yang di kemukakan di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah menempati kedudukan yang pokok dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah, sehingga ada beberapa proyek Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten di samping mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat juga mendapat limpahan dari propinsi tersebut juga berasal dari Pemerintah Pusat lewat APBN.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati diikuti dengan pembiayaannya.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan, yaitu ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) dan (2) adalah:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asas desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya manusia dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung usaha yang diserahkan kepada daerah. Masalahnya bukan jumlah dana yang memadai tetapi seberapa

jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah.

Dalam hubungan tersebut Tjanya Supriatna (2001: 173) menegaskan bahwa dibutuhkan kebijaksanaan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek yaitu :

- a) Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan
- b) Sumber Pendapatan Asli Daerah
- c) Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

Sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serta berdaya guna dan berhasil guna. Mobilisasi keuangan daerah erat kaitannya dengan struktur peningkatan keuangan yang diarahkan pada penggalian potensi, investasi dan bantuan.

Menurut Tjanya Supriatna (2001: 74) Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai

proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari APBD. Tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa bagi hasil dari pemerintah pusat atau subsidi. Hanya saja jika pemerintah pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini, maka subsidi tersebut harus bersifat beban (*black grant*), dimana penggunaan sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah dalam APBD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Kedua, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Ketiga, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan

penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu, penguasaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah
4. Lain-lain usaha yang sah

Penjelasan lebih lanjut dari sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

2.5 Pajak Daerah

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah, (2002: 265) Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Kabupaten/Kota :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.

1) Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

Yaitu pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik

berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

Biaya pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara otomatis di permukaan tanah.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 2) Subjek pajak dan wajib pajak daerah

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Subjek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor
- d. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan
- e. Subjek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotel

- f. Subjek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran
- g. Subjek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
- h. Subjek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- i. Subjek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan /atau pengguna tenaga listrik
- j. Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C
- k. Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.6 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah, (2002: 266)Retribusi daerah sebagaimana diharapkan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terdiri dari:

- a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2) Objek Retribusi Daerah

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha-usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi :

- (1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- (2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelanggan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat khusus parkir
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g. Retribusi penyedotan kakus
 - h. Retribusi rumah potong hewan
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - k. Retribusi penyebrangan di atas air
 - l. Retribusi pengolahan limbah cair
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minimum beralokasi
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan di atas, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

3) Besarnya Retribusi yang tertuang dan tarif Retribusi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, besarnya retribusi yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai. Dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk bagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang dibedakan menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa sebagai contoh:

- a) Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
- b) Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
- c) Tarif retribusi parkir ditepi jalan yang rawan kemacetan dapat diterapkan lebih tinggi daripada ditepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta jenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan izin pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

4) Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Kepala Desa

Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukkan kepada desa yang terlihat langsung dalam pemberian layanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. Bagian desa ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek ketertiban desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian desa ini ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

2.7 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upayapenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,

tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan dari pusat dan daerah diatur dengan Undang-Undang. Dengan peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian, kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari kemampuan untuk memperoleh dana pembangunan yang diimbangi dengan instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, nasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang-undang tersebut.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penanganan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan kekuasaan dalam menetapkan produk pengaturan dan ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Mengacu pada kedua Undang-undang tersebut, pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan upaya tersebut diharapkan Daerah didorong untuk lebih kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan permutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut :

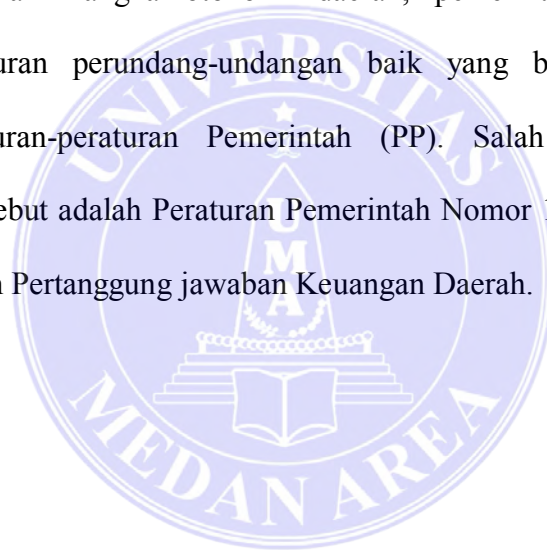
- a) Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah .
- b) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- c) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
- d) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui masyarakat.

Salah satu fungsi kontrol yang dimiliki DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah termasuk didalamnya menyangkut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meskipun kepala daerah berwenang penuh dalam penyusunan dan pengelolaannya akan tetapi harus tetap melibatkan DPRD, dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahkan disebutkan bahwa tanpa persetujuan dari DPRD rancangan APBD yang diajukan kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah dalam satuan rupiah, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 secara garis besar APBD terdiri dari dua komponen pokok yaitu pendapatan dan

belanja daerah. Komponen pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan sedangkan komponen belanja daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Anggaran belanja rutin digunakan untuk mempunyai teknis operasional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (*publik service*) sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur baik yang berupa fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian daerah maupun aspek kehidupan lainnya.

Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik yang berupa Undang-undang maupun Peraturan-peraturan Pemerintah (PP). Salah satu dari peraturan pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2013:1) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari 2016 sampai dengan february 2016.

3.3 Informan Penelitian

Moleong (2004) menyatakan informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Dalam menentukan informan dapat dibagi menjadi tiga yaitu informan kunci, utama dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi social yang di teliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Kunci, terdiri dari:

- 1). Kepala Bidang Penetapan Pendapatan Daerah Dispenda Kabupaten Padang Lawas.
- 2). Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian Dispenda Kabupaten Padang Lawas.
- 3). Staff Bidang Pendapatan Daerah Dispenda Kabupaten Padang Lawas.
- 4). Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah Dispenda Kabupaten Padang Lawas.

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat dalam wajib pajak restoran Kabupaten Padang Lawas.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan dan mempelajari bahan literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan yaitu penelitian langsung ke objek penelitian.
 - a. Wawancara, yaitu mewawancarai orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi.
 - b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang relevan.
 - c. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung ke objek.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik SWOT yang merupakan singkatan yang diambil dari huruf depan kata *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threat*, yang dalam bahasa Indonesia mudahnya diartikan sebagai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Metode analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan/rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa SWOT akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat oleh perusahaan itu sendiri. Kotler (2008 : 88) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman disebut analisis SWOT. Udan (2005:118) mendefinisikan analisis SWOT adalah “Penilaian/*assessment* terhadap indentifikasi situasi untuk menemukan apakah suatu kondisi dikatakan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kekuatan (*Strenght*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menangani peluang dan ancaman.
- b. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman.

- c. Peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam suatu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.
- d. Ancaman (*Threat*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan/dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- D. Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung : Sinar Baru
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- D. Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Hamel, G dan Prahalad, C, K, 1995. *Kompetisi Masa Depan*. Yakarta : Bina Rupa Aksara.
- Marrus, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksa. Jakarta.
- Quinn, J.B. (1999), *Strategies for change*. In: Mintzberg, H. & Quinn, J.B. (Eds.) *The*
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana,
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2007, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tjanya Supriatna, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Udan, T Ripomo, 2005. *Analysis SWOT*. Andi, Yogyakarta.



Peraturan Perundang-Undangan RI

Undang-Undang Dasar 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN

periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010

4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran			
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran			
		31/12/2010	0001/PAD/LBARUMUN/2010	6.383.500,00
		31/12/2010	0001/PAD/SUTAM/2010	2.265.000,00
		31/12/2010	001/STS/BARTENG/2010	1.120.000,00
		31/12/2010	001/STS/DPKAD/2010	101.479.875,00
		31/12/2010	001/STS/HURAGI/2010	9.970.000,00
		31/12/2010	001/STS/HURISTAK/2010	628.000,00
		31/12/2010	001/STS/NAKER/2010	375.000,00
		31/12/2010	001/STS/RSUD/2010	1.270.000,00
		31/12/2010	001/STS/SOSA/2010	2.743.000,00
		31/12/2010	001/STS/ULUBAR/2010	1.112.000,00
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan			9.057.650,00
		31/12/2010	001/STS/BARUMUN/2010	5.010.000,00
		31/12/2010	001/STS/SOSOPAN/2010	3.029.650,00
		31/12/2010	001/STS/ULUBAR/2010	1.018.000,00
				8.750.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN

periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011

4.1.1.02 Pajak Restoran				
4.1.1.02	Restoran			18.033.700,00
		05/01/2011	0001/BenPen-	1.153.000,00
		19/09/2011	0001/PAD/SOSOPAN/2011	1.050.700,00
		25/10/2011	0004/BP/AEKNABARA/2011	4.500.000,00
		28/10/2011	0007/BenPen-Huragi/X/2011	500.000,00
		28/10/2011	0009/BenPen-/Barteng/2011	380.000,00
		01/11/2011	0008/BenPen-Huragi/XI/2011	900.000,00
		16/11/2011	0009/BenPen-Huragi/XI/2011	1.000.000,00
		23/11/2011	0017/BenPen-/Barteng/2011	50.000,00
		02/12/2011	0005/BP/AEKNABARA/2011	3.000.000,00
		12/12/2011	0011/BenPen-Huragi/XII/2011	1.500.000,00
		12/12/2011	0012/BenPen-Huragi/XII/2011	2.000.000,00
		23/12/2011	0006/BP/AEKNABARA/2011	2.000.000,00
4.1.1.02	Rumah Makan			36.119.406,00
		23/03/2011	0001/PEN/LUBAR/III/2011	1.780.000,00
		21/07/2011	0004/PEN/LUBAR/VII/2011	800.000,00
		27/07/2011	0201/BP/PERIZINAN/XII/2011	125.000,00
		27/07/2011	0203/BP/PERIZINAN/VII/2011	250.000,00
		10/08/2011	0113/Benpen-DPKA/VIII/2011	960.000,00
		16/09/2011	0056/Benpen-DPKA/IX/2011	199.500,00
		16/09/2011	0057/Benpen-DPKA/IX/2011	210.000,00
		16/09/2011	0058/Benpen-DPKA/IX/2011	199.500,00
		16/09/2011	0059/Benpen-DPKA/IX/2011	165.000,00
		16/09/2011	0060/Benpen-DPKA/IX/2011	127.500,00
		16/09/2011	0061/Benpen-DPKA/IX/2011	123.750,00
		16/09/2011	0062/Benpen-DPKA/IX/2011	202.500,00
		16/09/2011	0063/Benpen-DPKA/IX/2011	168.750,00
		16/09/2011	0064/Benpen-DPKA/IX/2011	202.500,00
		16/09/2011	0065/Benpen-DPKA/IX/2011	202.500,00
		16/09/2011	0066/Benpen-DPKA/IX/2011	126.000,00
		16/09/2011	0067/Benpen-DPKA/IX/2011	198.000,00
		16/09/2011	0068/Benpen-DPKA/IX/2011	161.250,00
		16/09/2011	0069/Benpen-DPKA/IX/2011	208.500,00
		16/09/2011	0070/Benpen-DPKA/IX/2011	194.250,00
		16/09/2011	0071/Benpen-DPKA/IX/2011	124.500,00
		16/09/2011	0072/Benpen-DPKA/IX/2011	164.250,00
		16/09/2011	0073/Benpen-DPKA/IX/2011	206.250,00
		16/09/2011	0074/Benpen-DPKA/IX/2011	196.500,00
		16/09/2011	0075/Benpen-DPKA/IX/2011	204.750,00
		21/09/2011	0006/PEN/LUBAR/IX/2011	500.000,00
		30/09/2011	0004/BenPen-Sutam/IX/2011	1.250.000,00
		06/10/2011	0112/Benpen-DPKA/X/2011	495.000,00
		07/10/2011	0006/BP/HURISTAK/2011	1.200.000,00
		12/10/2011	0012/BenPen-/Barteng/2011	793.000,00
		04/11/2011	0010/PEN/LUBAR/XI/2011	500.000,00
		14/11/2011	0111/Benpen-DPKA/XI/2011	2.670.568,00
		16/11/2011	0204/BP/PERIZINAN/XI/2011	500.000,00
		16/11/2011	0205/BP/PERIZINAN/XI/2011	725.500,00
		16/11/2011	0206/BP/PERIZINAN/XI/2011	249.500,00
		24/11/2011	0008/BP/HURISTAK/2011	3.000.000,00
		24/11/2011	0031/BenPen-	3.230.338,00
		25/11/2011	0051/Benpen-DPKA/XI/2011	337.500,00
		25/11/2011	0052/Benpen-DPKA/XI/2011	337.500,00
		25/11/2011	0053/Benpen-DPKA/XI/2011	375.000,00
		25/11/2011	0054/Benpen-DPKA/XI/2011	375.000,00
		01/12/2011	0001/BP/UBAR/2012	3.274.500,00
		06/12/2011	0004/BP/UBAR/2011	30.000,00
		08/12/2011	0055/Benpen-DPKA/XII/2011	101.250,00
		08/12/2011	0076/Benpen-DPKA/XII/2011	101.250,00
		13/12/2011	0011/PEN/LUBAR/XII/2011	1.416.000,00
		29/12/2011	0077/Benpen-DPKA/XII/2011	120.750,00
		29/12/2011	0078/Benpen-DPKA/XII/2011	125.250,00
		29/12/2011	0079/Benpen-DPKA/XII/2011	125.250,00
		29/12/2011	0080/Benpen-DPKA/XII/2011	124.500,00

29/12/2011	0081/Benpen-DPKA/XII/2011	126.000,00
29/12/2011	0082/Benpen-DPKA/XII/2011	123.750,00
29/12/2011	0083/Benpen-DPKA/XII/2011	128.250,00
29/12/2011	0084/Benpen-DPKA/XII/2011	123.750,00
29/12/2011	0085/Benpen-DPKA/XII/2011	191.250,00
29/12/2011	0086/Benpen-DPKA/XII/2011	199.500,00
29/12/2011	0087/Benpen-DPKA/XII/2011	199.500,00
29/12/2011	0088/Benpen-DPKA/XII/2011	200.000,00
29/12/2011	0089/Benpen-DPKA/XII/2011	200.000,00
29/12/2011	0090/Benpen-DPKA/XII/2011	200.000,00
30/12/2011	0001/BP/HURISTAK/2011	2.100.000,00
30/12/2011	0091/Benpen-DPKA/XII/2011	265.000,00
30/12/2011	0092/Benpen-DPKA/XII/2011	296.250,00
30/12/2011	0093/Benpen-DPKA/XII/2011	300.000,00
30/12/2011	0094/Benpen-DPKA/XII/2011	307.500,00
30/12/2011	0095/Benpen-DPKA/XII/2011	296.250,00
30/12/2011	0096/Benpen-DPKA/XII/2011	300.000,00
30/12/2011	0097/Benpen-DPKA/XII/2011	277.500,00
30/12/2011	0098/Benpen-DPKA/XII/2011	240.000,00
30/12/2011	0099/Benpen-DPKA/XII/2011	270.000,00
30/12/2011	0100/Benpen-DPKA/XII/2011	232.500,00
30/12/2011	0207/BP/PERIZINAN/XII/2011	84.000,00
		13.650.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN

periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012

4 . 1 . 1 . 02

Pajak Restoran

4 . 1 . 1 . 02 . 01

Restoran

04/01/2012	0001/BenPen-Huragi/I/2012	1.500.000,00
04/01/2012	0005/BenPen-Huragi/I/2012	1.000.000,00
05/01/2012	0005/BenPen-Sosopan/I/2012	500.000,00
07/02/2012	0014/BenPen-UluBarumun/II/2012	150.000,00
07/02/2012	0466/BenPen-DPKA/II/2012	500.000,00
07/02/2012	0467/BenPen-DPKA/II/2012	480.000,00
07/02/2012	0468/BenPen-DPKA/II/2012	725.000,00
07/02/2012	0469/BenPen-DPKA/II/2012	1.028.000,00
08/02/2012	0470/BenPen-DPKA/II/2012	1.950.000,00
08/02/2012	0471/BenPen-DPKA/II/2012	397.750,00
08/02/2012	0472/BenPen-DPKA/II/2012	450.000,00
08/02/2012	0473/BenPen-DPKA/II/2012	720.000,00
08/02/2012	0474/BenPen-DPKA/II/2012	225.000,00
08/02/2012	0475/BenPen-DPKA/II/2012	975.000,00
08/02/2012	0476/BenPen-DPKA/II/2012	360.000,00
09/02/2012	0477/BenPen-DPKA/II/2012	2.776.932,00
13/02/2012	0493/BenPen-DPKA/II/2012	172.500,00
13/02/2012	0494/BenPen-DPKA/II/2012	6.241.927,00
21/02/2012	0484/BenPen-DPKA/II/2012	165.000,00
05/03/2012	0495/BenPen-DPKA/III/2012	370.000,00
04/04/2012	0001/BenPen-Aeknabara/IV/2012	3.200.000,00
19/04/2012	0004/BenPen-Huristik/IV/2012	1.500.000,00
23/04/2012	0010/BenPen-Huragi/IV/2012	605.000,00
10/05/2012	0005/BenPen-Huristik/V/2012	200.000,00
10/05/2012	0015/BenPen-Aeknabara/V/2012	500.000,00
23/05/2012	0485/BenPen-DPKA/V/2012	825.000,00
07/06/2012	0002/BenPen-Sihapas/VI/2012	300.000,00
25/06/2012	0008/Benpen-L.barumun/VI/2012	500.000,00
29/06/2012	0003/Benpen-BI.Sutam/VI/2012	1.100.000,00
02/07/2012	0011/BenPen-Barteng/VII/2012	382.000,00
09/07/2012	0448/BenPen-DPKA/VII/2012	4.000.000,00
11/07/2012	0007/BenPen-Sihapas/VII/2012	200.000,00
08/08/2012	0020/BenPen-Huristik/VIII/2012	198.000,00
08/08/2012	0449/BenPen-DPKA/VIII/2012	2.713.500,00
08/08/2012	0487/BenPen-DPKA/VIII/2012	667.500,00
14/08/2012	0002/BenPen-Barsel/VIII/2012	2.500.000,00
30/08/2012	0450/BenPen-DPKA/VIII/2012	44.250,00
30/08/2012	0451/BenPen-DPKA/VIII/2012	100.000,00
06/09/2012	0025/BenPen-Aeknabara/IX/2012	300.000,00
21/09/2012	0306/BenPen-DPKA/IX/2012	166.500,00
21/09/2012	0307/BenPen-DPKA/IX/2012	151.900,00
21/09/2012	0308/BenPen-DPKA/IX/2012	200.000,00
21/09/2012	0309/BenPen-DPKA/IX/2012	210.000,00
21/09/2012	0310/BenPen-DPKA/IX/2012	180.000,00
24/09/2012	0300/BenPen-DPKA/IX/2012	133.500,00
28/09/2012	0329/BenPen-DPKA/IX/2012	170.000,00
28/09/2012	0330/BenPen-DPKA/IX/2012	498.200,00
28/09/2012	0331/BenPen-DPKA/IX/2012	480.000,00
04/10/2012	0009/BenPen-Sosopan/X/2012	230.000,00
04/10/2012	0011/Benpen-BI.Sutam/X/2012	450.000,00
05/10/2012	0339/BenPen-DPKA/XI/2012	644.885,00
05/10/2012	0340/BenPen-DPKA/X/2012	1.140.000,00
17/10/2012	0324/BenPen-DPKA/X/2012	870.000,00
18/10/2012	0325/BenPen-DPKA/X/2012	40.000,00
25/10/2012	0303/BenPen-DPKA/X/2012	500.000,00
29/10/2012	0311/BenPen-DPKA/X/2012	150.000,00
29/10/2012	0312/BenPen-DPKA/X/2012	193.000,00
29/10/2012	0313/BenPen-DPKA/X/2012	990.000,00
29/10/2012	0314/BenPen-DPKA/X/2012	182.600,00
29/10/2012	0315/BenPen-DPKA/X/2012	193.500,00

30/10/2012	0316/BenPen-DPKA/XI/2012	135.000,00
01/11/2012	0304/BenPen-DPKA/XI/2012	35.000,00
05/11/2012	0299/BenPen-DPKA/XI/2012	1.333.500,00
09/11/2012	0290/BenPen-DPKA/XI/2012	157.500,00
09/11/2012	0291/BenPen-DPKA/XI/2012	50.000,00
09/11/2012	0340/BenPen-DPKA/XI/2012	33.750,00
13/11/2012	0298/BenPen-DPKA/XI/2012	140.500,00
14/11/2012	0292/BenPen-DPKA/XI/2012	320.000,00
14/11/2012	0293/BenPen-DPKA/XI/2012	600.000,00
14/11/2012	0294/BenPen-DPKA/XI/2012	580.000,00
14/11/2012	0295/BenPen-DPKA/XI/2012	378.000,00
14/11/2012	0296/BenPen-DPKA/XI/2012	540.000,00
14/11/2012	0297/BenPen-DPKA/XI/2012	522.000,00
19/11/2012	0301/BenPen-DPKA/XI/2012	750.000,00
19/11/2012	0317/BenPen-DPKA/XI/2012	750.000,00
19/11/2012	0341/BenPen-DPKA/XI/2012	1.000.000,00
20/11/2012	0496/BenPen-DPKA/XI/2012	72.500,00
21/11/2012	0071/BenPen-Barumun/XI/2012	70.000,00
21/11/2012	0072/BenPen-Barumun/XI/2012	100.000,00
21/11/2012	0073/BenPen-Barumun/XI/2012	440.000,00
21/11/2012	0074/BenPen-Barumun/XI/2012	25.000,00
21/11/2012	0075/BenPen-Barumun/XI/2012	104.000,00
21/11/2012	0076/BenPen-Barumun/XI/2012	250.000,00
21/11/2012	0077/BenPen-Barumun/XI/2012	120.000,00
21/11/2012	0078/BenPen-Barumun/XI/2012	110.000,00
21/11/2012	0079/BenPen-Barumun/XI/2012	46.000,00
21/11/2012	0080/BenPen-Barumun/XI/2012	90.000,00
21/11/2012	0343/BenPen-DPKA/XI/2012	202.500,00
22/11/2012	0082/BenPen-Barumun/XI/2012	100.000,00
23/11/2012	0302/BenPen-DPKA/XI/2012	500.000,00
27/11/2012	0320/BenPen-DPKA/XI/2012	1.479.000,00
27/11/2012	0332/BenPen-DPKA/XI/2012	60.000,00
27/11/2012	0333/BenPen-DPKA/XI/2012	87.000,00
27/11/2012	0334/BenPen-DPKA/XI/2012	48.000,00
27/11/2012	0335/BenPen-DPKA/XI/2012	22.500,00
27/11/2012	0336/BenPen-DPKA/XI/2012	22.500,00
27/11/2012	0337/BenPen-DPKA/XI/2012	30.000,00
27/11/2012	0338/BenPen-DPKA/XI/2012	330.000,00
27/11/2012	0344/BenPen-DPKA/XI/2012	700.000,00
28/11/2012	0321/BenPen-DPKA/XI/2012	208.500,00
28/11/2012	0322/BenPen-DPKA/XI/2012	180.000,00
29/11/2012	0323/BenPen-DPKA/XI/2012	33.750,00
30/11/2012	0345/BenPen-DPKA/XI/2012	600.000,00
30/11/2012	0346/BenPen-DPKA/XI/2012	1.875.000,00
30/11/2012	0347/BenPen-DPKA/XI/2012	60.000,00
04/12/2012	0348/BenPen-DPKA/XII/2012	58.000,00
04/12/2012	0349/BenPen-DPKA/XII/2012	62.500,00
04/12/2012	0350/BenPen-DPKA/XII/2012	70.000,00
04/12/2012	0351/BenPen-DPKA/XII/2012	53.000,00
04/12/2012	0352/BenPen-DPKA/XII/2012	70.000,00
04/12/2012	0353/BenPen-DPKA/XII/2012	70.000,00
06/12/2012	0410/BenPen-DPKA/XII/2012	407.150,00
06/12/2012	0411/BenPen-DPKA/XII/2012	456.000,00
06/12/2012	0412/BenPen-DPKA/XII/2012	380.000,00
06/12/2012	0413/BenPen-DPKA/XII/2012	396.000,00
06/12/2012	0414/BenPen-DPKA/XII/2012	387.600,00
06/12/2012	0415/BenPen-DPKA/XII/2012	166.400,00
06/12/2012	0416/BenPen-DPKA/XII/2012	265.200,00
07/12/2012	0399/BenPen-DPKA/XII/2012	235.000,00
10/12/2012	0400/BenPen-DPKA/XII/2012	698.000,00
10/12/2012	0402/BenPen-DPKA/XII/2012	330.000,00
10/12/2012	0403/BenPen-DPKA/XII/2012	105.000,00
10/12/2012	0404/BenPen-DPKA/XII/2012	225.000,00
10/12/2012	0405/BenPen-DPKA/XII/2012	330.000,00
11/12/2012	0358/BenPen-DPKA/XII/2012	427.500,00
11/12/2012	0359/BenPen-DPKA/XII/2012	200.000,00
12/12/2012	0360/BenPen-DPKA/XII/2012	876.000,00
12/12/2012	0389/BenPen-DPKA/XII/2012	341.300,00
12/12/2012	0401/BenPen-DPKA/XII/2012	41.500,00

12/12/2012	0406/BenPen-DPKA/XII/2012	569.250,00
12/12/2012	0407/BenPen-DPKA/XII/2012	785.600,00
13/12/2012	0365/BenPen-DPKA/XII/2012	800.000,00
14/12/2012	0032/BenPen-Barteng/XII/2012	1.006.000,00
14/12/2012	0042/BenPen-Aeknabara/XII/2012	500.000,00
18/12/2012	0371/BenPen-DPKA/XII/2012	850.000,00
18/12/2012	0372/BenPen-DPKA/XII/2012	850.000,00
19/12/2012	0373/BenPen-DPKA/XII/2012	200.000,00
19/12/2012	0374/BenPen-DPKA/XII/2012	250.000,00
19/12/2012	0375/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0376/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0377/BenPen-DPKA/XII/2012	125.800,00
19/12/2012	0378/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0379/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0380/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0381/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0382/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0383/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0384/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0385/BenPen-DPKA/XII/2012	87.450,00
19/12/2012	0408/BenPen-DPKA/XII/2012	546.000,00
19/12/2012	0409/BenPen-DPKA/XII/2012	124.000,00
20/12/2012	0386/BenPen-DPKA/XII/2012	558.410,00
20/12/2012	0428/BenPen-DPKA/XII/2012	300.000,00
20/12/2012	0429/BenPen-DPKA/XII/2012	700.000,00
21/12/2012	0017/Benpen-BI.Sutam/XII/2012	264.000,00
21/12/2012	0039/BenPen-Barteng/XII/2012	550.000,00
21/12/2012	0430/BenPen-DPKA/XII/2012	990.000,00
21/12/2012	0431/BenPen-DPKA/XII/2012	79.500,00
21/12/2012	0432/BenPen-DPKA/XII/2012	49.500,00
21/12/2012	0433/BenPen-DPKA/XII/2012	120.000,00
26/12/2012	0390/BenPen-DPKA/XII/2012	84.000,00
26/12/2012	0391/BenPen-DPKA/XII/2012	172.500,00
26/12/2012	0392/BenPen-DPKA/XII/2012	151.900,00
26/12/2012	0393/BenPen-DPKA/XII/2012	181.500,00
27/12/2012	0026/BenPen-Huristak/XII/2012	2.700.000,00
27/12/2012	0396/BenPen-DPKA/XII/2012	2.405.200,00
27/12/2012	0397/BenPen-DPKA/XII/2012	970.000,00
27/12/2012	0398/BenPen-DPKA/XII/2012	1.758.000,00
27/12/2012	0422/BenPen-DPKA/XII/2012	67.000,00
27/12/2012	0423/BenPen-DPKA/XII/2012	62.500,00
27/12/2012	0424/BenPen-DPKA/XII/2012	77.000,00
27/12/2012	0425/BenPen-DPKA/XII/2012	43.800,00
27/12/2012	0426/BenPen-DPKA/XII/2012	300.000,00
27/12/2012	0427/BenPen-DPKA/XII/2012	300.000,00
27/12/2012	0434/BenPen-DPKA/XII/2012	150.000,00
28/12/2012	0014/Benpen-BI.Sutam/XII/2012	300.000,00
28/12/2012	0394/BenPen-DPKA/XII/2012	810.000,00
28/12/2012	0395/BenPen-DPKA/XII/2012	360.000,00
28/12/2012	0417/BenPen-DPKA/XII/2012	887.500,00
28/12/2012	0418/BenPen-DPKA/XII/2012	906.000,00
28/12/2012	0419/BenPen-DPKA/XII/2012	960.000,00
28/12/2012	0420/BenPen-DPKA/XII/2012	252.300,00
28/12/2012	0421/BenPen-DPKA/XII/2012	228.000,00
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.10.1/2012	(1.938.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.11.1/2012	(2.114.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.12.1/2012	(4.598.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.13.1/2012	(3.105.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.14.1/2012	(500.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.16.1/2012	(730.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.17.1/2012	(150.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.18.1/2012	(4.500.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.19.1/2012	(500.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.21.1/2012	(2.500.000,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.5.1/2012	(73.368.854,00)
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.9.1/2012	(1.455.000,00)

12/01/2012	0002/BenPen-DPKA/I/2012	712.500,00
16/01/2012	0123/BenPen-DPKA/I/2012	931.440,00
16/01/2012	0124/BenPen-DPKA/I/2012	1.371.000,00
16/01/2012	0126/BenPen-DPKA/I/2012	51.900,00
16/01/2012	0131/BenPen-DPKA/I/2012	1.667.000,00
16/01/2012	0132/BenPen-DPKA/I/2012	1.667.000,00
16/01/2012	0133/BenPen-DPKA/I/2012	1.667.000,00
16/01/2012	0134/BenPen-DPKA/I/2012	721.900,00
16/01/2012	0135/BenPen-DPKA/I/2012	6.353.260,00
16/01/2012	0136/BenPen-DPKA/I/2012	540.000,00
16/01/2012	0137/BenPen-DPKA/I/2012	60.000,00
16/01/2012	0138/BenPen-DPKA/I/2012	52.500,00
19/01/2012	0003/BenPen-DPKA/I/2012	468.750,00
19/01/2012	0004/BenPen-DPKA/I/2012	1.062.500,00
19/01/2012	0005/BenPen-DPKA/I/2012	198.000,00
19/01/2012	0006/BenPen-DPKA/I/2012	200.000,00
19/01/2012	0007/BenPen-DPKA/I/2012	101.250,00
19/01/2012	0008/BenPen-DPKA/I/2012	562.500,00
19/01/2012	0009/BenPen-DPKA/I/2012	249.750,00
19/01/2012	0010/BenPen-DPKA/I/2012	249.750,00
19/01/2012	0011/BenPen-DPKA/I/2012	150.000,00
25/01/2012	0012/BenPen-DPKA/I/2012	122.727,00
25/01/2012	0013/BenPen-DPKA/I/2012	368.181,00
27/01/2012	0127/BenPen-DPKA/I/2012	540.000,00
27/01/2012	0128/BenPen-DPKA/I/2012	700.000,00
27/01/2012	0129/BenPen-DPKA/I/2012	5.484.000,00
08/02/2012	0015/BenPen-DPKA/II/2012	2.318.636,00
08/02/2012	0497/BenPen-DPKA/II/2012	975.000,00
17/02/2012	0143/BenPen-DPKA/II/2012	500.000,00
17/02/2012	0145/BenPen-DPKA/II/2012	724.545,00
20/02/2012	0016/BenPen-DPKA/II/2012	3.610.132,00
21/02/2012	0017/BenPen-DPKA/II/2012	2.100.000,00
21/02/2012	0140/BenPen-DPKA/II/2012	1.160.750,00
21/02/2012	0141/BenPen-DPKA/II/2012	225.000,00
21/02/2012	0142/BenPen-DPKA/II/2012	799.900,00
09/03/2012	0061/BenPen-DPKA/III/2012	100.300,00
09/03/2012	0062/BenPen-DPKA/III/2012	200.000,00
09/03/2012	0063/BenPen-DPKA/III/2012	200.000,00
09/03/2012	0064/BenPen-DPKA/III/2012	200.000,00
09/03/2012	0065/BenPen-DPKA/III/2012	200.000,00
09/03/2012	0066/BenPen-DPKA/III/2012	600.300,00
09/03/2012	0067/BenPen-DPKA/III/2012	200.000,00
09/03/2012	0068/BenPen-DPKA/III/2012	199.700,00
09/03/2012	0069/BenPen-DPKA/III/2012	299.700,00
09/03/2012	0070/BenPen-DPKA/III/2012	8.814.750,00
09/03/2012	0071/BenPen-DPKA/III/2012	8.814.750,00
09/03/2012	0072/BenPen-DPKA/III/2012	8.143.750,00
09/03/2012	0073/BenPen-DPKA/III/2012	7.665.000,00
09/03/2012	0074/BenPen-DPKA/III/2012	200.000,00
09/03/2012	0075/BenPen-DPKA/III/2012	200.000,00
28/03/2012	0022/BenPen-DPKA/III/2012	825.000,00
28/03/2012	0023/BenPen-DPKA/III/2012	675.000,00
28/03/2012	0024/BenPen-DPKA/III/2012	1.500.000,00
28/03/2012	0025/BenPen-DPKA/III/2012	1.500.000,00
28/03/2012	0026/BenPen-DPKA/III/2012	1.500.000,00
28/03/2012	0027/BenPen-DPKA/III/2012	1.500.000,00
28/03/2012	0028/BenPen-DPKA/III/2012	900.000,00
28/03/2012	0029/BenPen-DPKA/III/2012	135.000,00
28/03/2012	0030/BenPen-DPKA/III/2012	297.750,00
17/04/2012	0031/BenPen-DPKA/IV/2012	1.297.500,00
17/04/2012	0032/BenPen-DPKA/IV/2012	120.750,00
17/04/2012	0033/BenPen-DPKA/IV/2012	123.750,00
17/04/2012	0034/BenPen-DPKA/IV/2012	125.250,00
17/04/2012	0035/BenPen-DPKA/IV/2012	1.062.500,00
20/04/2012	0036/BenPen-DPKA/IV/2012	573.500,00
08/05/2012	0498/BenPen-DPKA/V/2012	1.063.634,00
14/05/2012	0146/BenPen-DPKA/V/2012	696.000,00
15/05/2012	0039/BenPen-DPKA/V/2012	5.998.200,00
22/05/2012	0041/BenPen-DPKA/V/2012	7.153.250,00

23/05/2012	0144/BenPen-DPKA/VI/2012	675.000,00
24/05/2012	0042/BenPen-DPKA/VI/2012	279.000,00
24/05/2012	0043/BenPen-DPKA/VI/2012	350.000,00
24/05/2012	0044/BenPen-DPKA/VI/2012	300.000,00
24/05/2012	0045/BenPen-DPKA/VI/2012	250.000,00
24/05/2012	0046/BenPen-DPKA/VI/2012	350.000,00
24/05/2012	0047/BenPen-DPKA/VI/2012	350.000,00
24/05/2012	0048/BenPen-DPKA/VI/2012	250.000,00
24/05/2012	0049/BenPen-DPKA/VI/2012	230.000,00
24/05/2012	0050/BenPen-DPKA/VI/2012	254.500,00
24/05/2012	0051/BenPen-DPKA/VI/2012	144.000,00
24/05/2012	0052/BenPen-DPKA/VI/2012	134.000,00
24/05/2012	0053/BenPen-DPKA/VI/2012	300.000,00
28/05/2012	0054/BenPen-DPKA/VI/2012	2.205.000,00
29/05/2012	0055/BenPen-DPKA/VI/2012	40.000,00
30/05/2012	0056/BenPen-DPKA/VI/2012	263.636,00
30/05/2012	0057/BenPen-DPKA/VI/2012	909.545,00
30/05/2012	0147/BenPen-DPKA/VI/2012	207.000,00
30/05/2012	0148/BenPen-DPKA/VI/2012	390.000,00
31/05/2012	0059/BenPen-DPKA/VI/2012	5.467.500,00
31/05/2012	0060/BenPen-DPKA/VI/2012	127.273,00
05/06/2012	0102/BenPen-DPKA/VI/2012	10.467.300,00
05/06/2012	0104/BenPen-DPKA/VI/2012	7.858.000,00
06/06/2012	0076/BenPen-DPKA/VI/2012	349.000,00
06/06/2012	0077/BenPen-DPKA/IV/2012	375.000,00
06/06/2012	0078/BenPen-DPKA/VI/2012	1.858.200,00
06/06/2012	0079/BenPen-DPKA/VI/2012	299.250,00
06/06/2012	0080/BenPen-DPKA/VI/2012	495.000,00
06/06/2012	0081/BenPen-DPKA/VI/2012	225.000,00
06/06/2012	0082/BenPen-DPKA/VI/2012	300.000,00
06/06/2012	0083/BenPen-DPKA/VI/2012	104.000,00
06/06/2012	0084/BenPen-DPKA/VI/2012	262.500,00
06/06/2012	0085/BenPen-DPKA/VI/2012	112.500,00
06/06/2012	0086/BenPen-DPKA/VI/2012	273.750,00
06/06/2012	0087/BenPen-DPKA/VI/2012	180.000,00
06/06/2012	0088/BenPen-DPKA/VI/2012	405.000,00
06/06/2012	0089/BenPen-DPKA/VI/2012	262.500,00
06/06/2012	0090/BenPen-DPKA/VI/2012	187.500,00
06/06/2012	0091/BenPen-DPKA/VI/2012	213.000,00
06/06/2012	0092/BenPen-DPKA/VI/2012	350.800,00
06/06/2012	0093/BenPen-DPKA/VI/2012	187.500,00
06/06/2012	0094/BenPen-DPKA/VI/2012	348.800,00
06/06/2012	0095/BenPen-DPKA/VI/2012	349.600,00
06/06/2012	0096/BenPen-DPKA/VI/2012	104.000,00
06/06/2012	0097/BenPen-DPKA/VI/2012	1.060.000,00
06/06/2012	0098/BenPen-DPKA/VI/2012	174.000,00
06/06/2012	0099/BenPen-DPKA/VI/2012	149.000,00
06/06/2012	0100/BenPen-DPKA/VI/2012	174.000,00
06/06/2012	0101/BenPen-DPKA/VI/2012	145.000,00
06/06/2012	0103/BenPen-DPKA/VI/2012	8.786.750,00
11/06/2012	0107/BenPen-DPKA/VI/2012	134.340,00
18/06/2012	0150/BenPen-DPKA/VI/2012	1.566.000,00
20/06/2012	0109/BenPen-DPKA/VI/2012	560.000,00
20/06/2012	0110/BenPen-DPKA/VI/2012	805.000,00
20/06/2012	0111/BenPen-DPKA/VI/2012	441.000,00
20/06/2012	0113/BenPen-DPKA/VI/2012	789.000,00
20/06/2012	0114/BenPen-DPKA/VI/2012	330.000,00
20/06/2012	0115/BenPen-DPKA/VI/2012	330.000,00
20/06/2012	0116/BenPen-DPKA/VI/2012	100.000,00
20/06/2012	0117/BenPen-DPKA/VI/2012	195.000,00
20/06/2012	0118/BenPen-DPKA/VI/2012	2.199.600,00
20/06/2012	0149/BenPen-DPKA/VI/2012	98.400,00
22/06/2012	0153/BenPen-DPKA/VI/2012	1.000.000,00
27/06/2012	0154/BenPen-DPKA/VI/2012	194.000,00
27/06/2012	0155/BenPen-DPKA/VI/2012	547.500,00
27/06/2012	0156/BenPen-DPKA/VI/2012	180.000,00
28/06/2012	0122/BenPen-DPKA/VI/2012	127.273,00
29/06/2012	0151/BenPen-DPKA/VI/2012	646.875,00
29/06/2012	0222/BenPen-DPKA/IV/2012	264.000,00

29/06/2012	0223/BenPen-DPKA/IV/2012	337.250,00
16/07/2012	0170/BenPen-DPKA/VII/2012	6.078.250,00
19/07/2012	0171/BenPen-DPKA/VII/2012	697.500,00
23/07/2012	0241/BenPen-DPKA/VII/2012	1.125.000,00
23/07/2012	0242/BenPen-DPKA/VII/2012	800.000,00
24/07/2012	0172/BenPen-DPKA/VII/2012	101.500,00
24/07/2012	0173/BenPen-DPKA/VII/2012	3.000.000,00
26/07/2012	0243/BenPen-DPKA/VII/2012	480.000,00
26/07/2012	0244/BenPen-DPKA/VII/2012	238.000,00
26/07/2012	0245/BenPen-DPKA/VII/2012	477.500,00
30/07/2012	0174/BenPen-DPKA/VII/2012	360.000,00
30/07/2012	0175/BenPen-DPKA/VII/2012	123.750,00
30/07/2012	0176/BenPen-DPKA/VII/2012	172.500,00
30/07/2012	0177/BenPen-DPKA/VII/2012	201.000,00
30/07/2012	0178/BenPen-DPKA/VII/2012	124.500,00
30/07/2012	0179/BenPen-DPKA/VII/2012	180.000,00
30/07/2012	0180/BenPen-DPKA/VII/2012	171.000,00
30/07/2012	0181/BenPen-DPKA/VII/2012	177.000,00
30/07/2012	0182/BenPen-DPKA/VII/2012	174.000,00
30/07/2012	0183/BenPen-DPKA/VII/2012	200.250,00
31/07/2012	0184/BenPen-DPKA/VII/2012	8.600.000,00
03/08/2012	0185/BenPen-DPKA/VIII/2012	300.000,00
07/08/2012	0186/BenPen-DPKA/VIII/2012	150.000,00
07/08/2012	0187/BenPen-DPKA/VIII/2012	120.000,00
07/08/2012	0188/BenPen-DPKA/VIII/2012	35.000,00
07/08/2012	0189/BenPen-DPKA/VIII/2012	4.350.000,00
07/08/2012	0191/BenPen-DPKA/VIII/2012	175.300,00
07/08/2012	0192/BenPen-DPKA/VIII/2012	17.000,00
07/08/2012	0193/BenPen-DPKA/VIII/2012	28.000,00
07/08/2012	0194/BenPen-DPKA/VIII/2012	105.300,00
07/08/2012	0195/BenPen-DPKA/VIII/2012	105.300,00
07/08/2012	0196/BenPen-DPKA/VIII/2012	69.600,00
07/08/2012	0197/BenPen-DPKA/VIII/2012	342.000,00
07/08/2012	0198/BenPen-DPKA/VIII/2012	105.400,00
07/08/2012	0199/BenPen-DPKA/VIII/2012	105.300,00
07/08/2012	0200/BenPen-DPKA/VIII/2012	14.000,00
07/08/2012	0201/BenPen-DPKA/VIII/2012	342.000,00
07/08/2012	0202/BenPen-DPKA/VIII/2012	28.000,00
07/08/2012	0205/BenPen-DPKA/VIII/2012	82.700,00
07/08/2012	0232/BenPen-DPKA/VIII/2012	175.300,00
08/08/2012	0209/BenPen-DPKA/VIII/2012	1.272.500,00
09/08/2012	0207/BenPen-DPKA/VIII/2012	1.233.500,00
13/08/2012	0208/BenPen-DPKA/VIII/2012	1.432.600,00
31/08/2012	0257/BenPen-DPKA/VIII/2012	333.250,00
10/09/2012	0234/BenPen-DPKA/IX/2012	804.862,00
13/09/2012	0219/BenPen-DPKA/IX/2012	7.127.200,00
13/09/2012	0220/BenPen-DPKA/IX/2012	7.061.300,00
13/09/2012	0221/BenPen-DPKA/IX/2012	5.815.800,00
14/09/2012	0227/BenPen-DPKA/IX/2012	150.000,00
14/09/2012	0228/BenPen-DPKA/IX/2012	150.000,00
14/09/2012	0229/BenPen-DPKA/IX/2012	27.000,00
18/09/2012	0224/BenPen-DPKA/IX/2012	10.000.000,00
25/09/2012	0233/BenPen-DPKA/IX/2012	10.049.500,00
25/09/2012	0235/BenPen-DPKA/IX/2012	255.000,00
27/09/2012	0286/BenPen-DPKA/IX/2012	135.000,00
27/09/2012	0287/BenPen-DPKA/IX/2012	400.000,00
27/09/2012	0288/BenPen-DPKA/IX/2012	600.000,00
01/10/2012	0247/BenPen-DPKA/X/2012	500.000,00
01/10/2012	0248/BenPen-DPKA/X/2012	500.000,00
01/10/2012	0249/BenPen-DPKA/X/2012	174.000,00
01/10/2012	0250/BenPen-DPKA/X/2012	172.350,00
01/10/2012	0251/BenPen-DPKA/X/2012	300.000,00
01/10/2012	0252/BenPen-DPKA/X/2012	292.500,00
01/10/2012	0253/BenPen-DPKA/X/2012	296.250,00
04/10/2012	0254/BenPen-DPKA/X/2012	2.100.000,00
08/10/2012	0255/BenPen-DPKA/X/2012	360.000,00
08/10/2012	0279/BenPen-DPKA/X/2012	299.000,00
11/10/2012	0262/BenPen-DPKA/X/2012	31.500,00
12/10/2012	0258/BenPen-DPKA/X/2012	1.850.200,00

15/10/2012	0259/BenPen-DPKA/X/2012	137.500,00
15/10/2012	0260/BenPen-DPKA/X/2012	137.500,00
15/10/2012	0261/BenPen-DPKA/X/2012	157.500,00
16/10/2012	0280/BenPen-DPKA/X/2012	145.000,00
16/10/2012	0281/BenPen-DPKA/X/2012	72.500,00
16/10/2012	0282/BenPen-DPKA/X/2012	449.500,00
16/10/2012	0283/BenPen-DPKA/X/2012	29.500,00
16/10/2012	0284/BenPen-DPKA/X/2012	9.000,00
16/10/2012	0285/BenPen-DPKA/X/2012	33.500,00
19/10/2012	0263/BenPen-DPKA/X/2012	123.750,00
19/10/2012	0264/BenPen-DPKA/X/2012	124.500,00
19/10/2012	0265/BenPen-DPKA/X/2012	157.500,00
19/10/2012	0266/BenPen-DPKA/X/2012	112.500,00
19/10/2012	0267/BenPen-DPKA/X/2012	150.000,00
19/10/2012	0268/BenPen-DPKA/X/2012	199.500,00
19/10/2012	0269/BenPen-DPKA/X/2012	270.000,00
19/10/2012	0270/BenPen-DPKA/X/2012	112.500,00
19/10/2012	0271/BenPen-DPKA/X/2012	198.750,00
14/12/2012	0499/BenPen-DPKA/XII/2012	348.000,00
17/12/2012	0500/BenPen-DPKA/XII/2012	1.241.818,00
21/12/2012	0501/BenPen-DPKA/XII/2012	49.500,00
28/12/2012	0502/BenPen-DPKA/XII/2012	1.481.050,00
28/12/2012	0503/BenPen-DPKA/XII/2012	1.885.250,00
31/12/2012	993/PENUTUP/1.20.5.1/2012	(253.612.227,00)





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN

periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013

4 . 1 . 1 . 02

Pajak Restoran

4 . 1 . 1 . 02 . 01

Restoran

28/03/2013	0007.c/BenPen-UluBarumun/III/2013	110.000,00
04/04/2013	0013/BenPen-Barumun/IV/2013	175.000,00
04/04/2013	0014/BenPen-Barumun/IV/2013	440.000,00
04/04/2013	0015/BenPen-Barumun/IV/2013	40.000,00
04/04/2013	0016/BenPen-Barumun/IV/2013	100.000,00
04/04/2013	0017/BenPen-Barumun/IV/2013	50.000,00
04/04/2013	0018/BenPen-Barumun/IV/2013	120.000,00
04/04/2013	0019/BenPen-Barumun/IV/2013	440.000,00
04/04/2013	0020/BenPen-Barumun/IV/2013	30.000,00
08/04/2013	0003/BenPen-Lubuk Barumun/IV/2013	45.000,00
08/04/2013	0004/BenPen-Lubuk Barumun/IV/2013	120.000,00
08/04/2013	0006/BenPen-Lubuk Barumun/IV/2013	120.000,00
11/04/2013	0022/BenPen-Barumun/IV/2013	60.000,00
12/04/2013	0002/BenPenBarteng/IV/2013	100.000,00
12/04/2013	0003/BenPenBarteng/IV/2013	80.000,00
12/04/2013	0004/BenPenBarteng/IV/2013	70.000,00
15/04/2013	0003/BenPen-Barsel/IV/2013	70.000,00
18/04/2013	0029/BenPen-Barsel/IV/2013	40.000,00
19/04/2013	0008/BenPen-UluBarumun/IV/2013	42.000,00
24/04/2013	0005/BenPen-BL.Sutam/IV/2013	128.000,00
26/04/2013	0007/BenPen-Aeknabara/IV/2013	440.000,00
26/04/2013	0008/BenPen-Aeknabara/IV/2013	440.000,00
26/04/2013	0009/BenPen-Aeknabara/IV/2013	495.000,00
13/05/2013	0038/BenPen-Barsel/V/2013	40.000,00
13/05/2013	0039/BenPen-Barsel/V/2013	35.000,00
14/05/2013	0004/BenPen-Sosopan/V/2013	393.000,00
16/05/2013	0029/BenPen-Barumun/V/2013	715.000,00
20/05/2013	0012/BenPen-BL.Sutam/V/2013	64.000,00
21/05/2013	0010/BenPen-Barteng/V/2013	70.000,00
21/05/2013	0012/BenPen-Huragi/V/2013	1.505.000,00
22/05/2013	0007/BenPen-Huristak/V/2013	1.500.000,00
27/05/2013	0028/BenPen-UluBarumun/V/2013	147.000,00
31/05/2013	0012/BenPen-Aeknabara/V/2013	495.000,00
17/06/2013	0019/BenPen-Huragi/VI/2013	1.800.000,00
17/06/2013	0048/BenPen-Barsel/VI/2013	75.000,00
18/06/2013	0016/BenPen-Barteng/VI/2013	200.000,00
18/06/2013	0018/BenPen-Lubuk Barumun/VI/2013	75.000,00
18/06/2013	0019/BenPen-Lubuk Barumun/VI/2013	79.000,00
18/06/2013	0021/BenPen-BL.Sutam/VI/2013	128.000,00
18/06/2013	0032/BenPen-UluBarumun/VI/2013	200.000,00
28/06/2013	0035/BenPen-Barumun/VI/2013	390.000,00
28/06/2013	0036/BenPen-Barumun/VI/2013	550.000,00
28/06/2013	0037/BenPen-Barumun/VI/2013	200.000,00
28/06/2013	0039/BenPen-Barumun/VI/2013	230.000,00
28/06/2013	0040/BenPen-Barumun/VI/2013	155.000,00
08/07/2013	0025/BenPen-BL.Sutam/VII/2013	65.000,00

18/07/2013	0012/BenPen-Sosa/VII/2013	2.035.000,00
22/07/2013	0023/BenPen-Lubuk Barumun/VII/2013	332.000,00
22/07/2013	0024/BenPen-Lubuk Barumun/VII/2013	110.000,00
30/07/2013	0044/BenPen-UluBarumun/VII/2013	150.000,00
22/08/2013	0045/BenPen-UluBarumun/VIII/2013	332.000,00
29/08/2013	0022.B/BenPen-Huragi/VIII/2013	300.000,00
26/09/2013	0026/BenPen-Aeknabara/IX/2013	440.000,00
08/10/2013	0017/BenPen-Sihapas/X/2013	2.761.000,00
08/10/2013	0028/BenPen-Lubuk Barumun/X/2013	200.000,00
08/10/2013	0050/BenPen-Barsel/X/2013	75.000,00
10/10/2013	0053/BenPen-UluBarumun/X/2013	118.000,00
18/10/2013	0059.A/BenPen-UluBarumun/X/2013	50.000,00
21/10/2013	0065/BenPen-Barsel/X/2013	225.000,00
21/10/2013	0067/BenPen-UluBarumun/X/2013	50.000,00
22/10/2013	0041/BenPen-Barteng/X/2013	610.000,00
30/10/2013	0027/BenPen-Sosa/X/2013	3.455.000,00
30/10/2013	0069/BenPen-UluBarumun/X/2013	200.000,00
04/11/2013	0014/BenPen-Sosopan/XI/2013	30.000,00
07/11/2013	0046/BenPen-Barteng/XI/2013	1.444.000,00
08/11/2013	0044.D/BenPen-Huragi/XI/2013	1.000.000,00
08/11/2013	0066/BenPen-Barsel/XI/2013	430.000,00
12/11/2013	0075/BenPen-UluBarumun/XI/2013	2.795.000,00
13/11/2013	0024/BenPen-Huristik/XI/2013	5.000,00
14/11/2013	0015/BenPen-Sosopan/XI/2013	3.000.000,00
14/11/2013	0031/BenPen-Lubuk Barumun/XI/2013	5.189.000,00
14/11/2013	0037/BenPen-Aeknabara/XI/2013	385.000,00
14/11/2013	0062/BenPen-Barumun/XI/2013	7.175.650,00
14/11/2013	0081/BenPen-UluBarumun/XI/2013	38.000,00
15/11/2013	0064/BenPen-Barumun/XI/2013	1.143.050,00
09/12/2013	0041/BenPen-Aeknabara/XII/2013	502.000,00
09/12/2013	0042/BenPen-Aeknabara/XII/2013	37.000,00
16/12/2013	0049/BenPen-Aeknabara/XII/2013	135.000,00
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.10.1/2013	(2.574.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.11.1/2013	(385.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.12.1/2013	(1.505.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.13.1/2013	(4.605.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.14.1/2013	(6.270.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.15.1/2013	(5.490.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.16.1/2013	(3.423.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.17.1/2013	(4.232.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.18.1/2013	(3.369.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.19.1/2013	(2.761.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.21.1/2013	(990.000,00)
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.9.1/2013	(12.013.700,00)
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	0,00
02/01/2013	0001/BenPen-DPKA/I/2013	904.500,00
02/01/2013	0002/BenPen-DPKA/I/2013	197.000,00
02/01/2013	0003/BenPen-DPKA/I/2013	1.805.000,00

04/01/2013	0074/BenPen-DPKA/I/2013	600.000,00
04/01/2013	0075/BenPen-DPKA/I/2013	200.000,00
08/01/2013	0004/BenPen-DPKA/I/2013	249.750,00
08/01/2013	0005/BenPen-DPKA/I/2013	225.000,00
08/01/2013	0006/BenPen-DPKA/I/2013	186.750,00
08/01/2013	0007/BenPen-DPKA/I/2013	157.500,00
08/01/2013	0008/BenPen-DPKA/I/2013	150.000,00
08/01/2013	0009/BenPen-DPKA/I/2013	153.000,00
08/01/2013	0010/BenPen-DPKA/I/2013	154.500,00
08/01/2013	0011/BenPen-DPKA/I/2013	116.000,00
08/01/2013	0012/BenPen-DPKA/I/2013	116.000,00
08/01/2013	0013/BenPen-DPKA/I/2013	116.000,00
08/01/2013	0014/BenPen-DPKA/I/2013	116.000,00
08/01/2013	0015/BenPen-DPKA/I/2013	116.000,00
08/01/2013	0033/BenPen-DPKA/I/2013	116.000,00
09/01/2013	0016/BenPen-DPKA/I/2013	101.000,00
09/01/2013	0017/BenPen-DPKA/I/2013	147.000,00
09/01/2013	0018/BenPen-DPKA/I/2013	185.500,00
09/01/2013	0019/BenPen-DPKA/I/2013	90.000,00
09/01/2013	0020/BenPen-DPKA/I/2013	185.500,00
09/01/2013	0021/BenPen-DPKA/I/2013	185.000,00
09/01/2013	0022/BenPen-DPKA/I/2013	185.500,00
09/01/2013	0023/BenPen-DPKA/I/2013	185.500,00
09/01/2013	0024/BenPen-DPKA/I/2013	200.000,00
09/01/2013	0025/BenPen-DPKA/I/2013	200.000,00
09/01/2013	0026/BenPen-DPKA/I/2013	200.000,00
09/01/2013	0027/BenPen-DPKA/I/2013	185.500,00
09/01/2013	0030/BenPen-DPKA/I/2013	150.000,00
09/01/2013	0031/BenPen-DPKA/I/2013	150.000,00
10/01/2013	0028/BenPen-DPKA/I/2013	644.500,00
10/01/2013	0034/BenPen-DPKA/I/2013	980.575,00
10/01/2013	0035/BenPen-DPKA/I/2013	382.500,00
10/01/2013	0036/BenPen-DPKA/I/2013	450.000,00
11/01/2013	0037/BenPen-DPKA/I/2013	50.000,00
11/01/2013	0038/BenPen-DPKA/I/2013	75.000,00
11/01/2013	0039/BenPen-DPKA/I/2013	125.000,00
14/01/2013	0042/BenPen-DPKA/I/2013	763.800,00
15/01/2013	0043/BenPen-DPKA/I/2013	1.882.100,00
16/01/2013	0049/BenPen-DPKA/I/2013	165.000,00
16/01/2013	0050/BenPen-DPKA/I/2013	165.000,00
16/01/2013	0051/BenPen-DPKA/I/2013	125.000,00
16/01/2013	0052/BenPen-DPKA/I/2013	165.000,00
16/01/2013	0053/BenPen-DPKA/I/2013	165.000,00
16/01/2013	0054/BenPen-DPKA/I/2013	150.000,00
17/01/2013	0055/BenPen-DPKA/I/2013	3.218.700,00
23/01/2013	0056/BenPen-DPKA/I/2013	457.863,00
28/01/2013	0058/BenPen-DPKA/I/2013	148.200,00
28/01/2013	0059/BenPen-DPKA/I/2013	225.000,00
28/01/2013	0060/BenPen-DPKA/I/2013	202.500,00
28/01/2013	0061/BenPen-DPKA/I/2013	195.000,00
28/01/2013	0062/BenPen-DPKA/I/2013	168.500,00
28/01/2013	0063/BenPen-DPKA/I/2013	200.250,00
28/01/2013	0064/BenPen-DPKA/I/2013	290.000,00
28/01/2013	0065/BenPen-DPKA/I/2013	362.000,00
28/01/2013	0066/BenPen-DPKA/I/2013	112.000,00
28/01/2013	0067/BenPen-DPKA/I/2013	154.000,00
28/01/2013	0068/BenPen-DPKA/I/2013	125.000,00
28/01/2013	0069/BenPen-DPKA/I/2013	199.500,00
28/01/2013	0070/BenPen-DPKA/I/2013	161.250,00
29/01/2013	0071/BenPen-DPKA/I/2013	600.000,00
29/01/2013	0072/BenPen-DPKA/I/2013	644.500,00
31/01/2013	0029/BenPen-DPKA/I/2013	144.000,00
01/02/2013	0112/BenPen-DPKA/II/2013	793.250,00
01/02/2013	0113/BenPen-DPKA/II/2013	2.000.000,00

01/02/2013	0114/BenPen-DPKA/II/2013	1.100.000,00
01/02/2013	0115/BenPen-DPKA/II/2013	630.000,00
01/02/2013	0116/BenPen-DPKA/II/2013	394.500,00
01/02/2013	0117/BenPen-DPKA/II/2013	450.000,00
01/02/2013	0118/BenPen-DPKA/II/2013	610.000,00
01/02/2013	0119/BenPen-DPKA/II/2013	909.000,00
01/02/2013	0120/BenPen-DPKA/II/2013	1.600.000,00
01/02/2013	0121/BenPen-DPKA/II/2013	910.000,00
01/02/2013	0122/BenPen-DPKA/II/2013	200.000,00
01/02/2013	0123/BenPen-DPKA/II/2013	400.000,00
01/02/2013	0124/BenPen-DPKA/II/2013	610.000,00
07/02/2013	0080/BenPen-DPKA/II/2013	146.250,00
07/02/2013	0081/BenPen-DPKA/II/2013	123.750,00
07/02/2013	0082/BenPen-DPKA/II/2013	189.750,00
07/02/2013	0083/BenPen-DPKA/II/2013	213.750,00
07/02/2013	0084/BenPen-DPKA/II/2013	206.250,00
07/02/2013	0085/BenPen-DPKA/II/2013	191.250,00
07/02/2013	0086/BenPen-DPKA/II/2013	202.500,00
07/02/2013	0087/BenPen-DPKA/II/2013	123.000,00
07/02/2013	0088/BenPen-DPKA/II/2013	135.750,00
07/02/2013	0089/BenPen-DPKA/II/2013	116.250,00
07/02/2013	0090/BenPen-DPKA/II/2013	118.500,00
07/02/2013	0091/BenPen-DPKA/II/2013	140.250,00
07/02/2013	0092/BenPen-DPKA/II/2013	137.250,00
07/02/2013	0093/BenPen-DPKA/II/2013	122.250,00
07/02/2013	0094/BenPen-DPKA/II/2013	123.000,00
07/02/2013	0095/BenPen-DPKA/II/2013	123.750,00
07/02/2013	0096/BenPen-DPKA/II/2013	124.500,00
07/02/2013	0097/BenPen-DPKA/II/2013	205.500,00
07/02/2013	0098/BenPen-DPKA/II/2013	195.000,00
07/02/2013	0099/BenPen-DPKA/II/2013	197.250,00
07/02/2013	0100/BenPen-DPKA/II/2013	199.500,00
07/02/2013	0101/BenPen-DPKA/II/2013	198.750,00
07/02/2013	0102/BenPen-DPKA/II/2013	168.000,00
07/02/2013	0103/BenPen-DPKA/II/2013	157.500,00
07/02/2013	0104/BenPen-DPKA/II/2013	168.750,00
07/02/2013	0105/BenPen-DPKA/II/2013	168.750,00
07/02/2013	0125/BenPen-DPKA/II/2013	875.500,00
04/04/2013	0145/BenPen-DPKA/IV/2013	1.998.000,00
04/04/2013	0146/BenPen-DPKA/IV/2013	131.500,00
04/04/2013	0147/BenPen-DPKA/IV/2013	270.000,00
04/04/2013	0148/BenPen-DPKA/IV/2013	225.000,00
04/04/2013	0149/BenPen-DPKA/IV/2013	150.000,00
04/04/2013	0150/BenPen-DPKA/IV/2013	1.160.000,00
10/04/2013	0153/BenPen-DPKA/IV/2013	240.000,00
11/04/2013	0154/BenPen-DPKA/IV/2013	120.000,00
11/04/2013	0155/BenPen-DPKA/IV/2013	405.000,00
11/04/2013	0177/BenPen-DPKA/IV/2013	2.625.000,00
12/04/2013	0178/BenPen-DPKA/IV/2013	325.700,00
16/04/2013	0179/BenPen-DPKA/IV/2013	2.100.000,00
17/04/2013	0180/BenPen-DPKA/IV/2013	124.000,00
18/04/2013	0182/BenPen-DPKA/IV/2013	4.371.500,00
19/04/2013	0181/BenPen-DPKA/IV/2013	340.000,00
22/04/2013	0183/BenPen-DPKA/IV/2013	374.773,00
22/04/2013	0184/BenPen-DPKA/IV/2013	165.000,00
22/04/2013	0185/BenPen-DPKA/IV/2013	193.000,00
23/04/2013	0174/BenPen-DPKA/IV/2013	3.165.750,00
23/04/2013	0175/BenPen-DPKA/IV/2013	1.977.000,00
23/04/2013	0186/BenPen-DPKA/IV/2013	22.498.750,00
23/04/2013	0187/BenPen-DPKA/IV/2013	1.922.500,00
23/04/2013	0188/BenPen-DPKA/IV/2013	13.500.000,00
23/04/2013	0189/BenPen-DPKA/IV/2013	3.212.500,00
24/04/2013	0163/BenPen-DPKA/IV/2013	3.250.000,00
24/04/2013	0168/BenPen-DPKA/IV/2013	166.000,00



24/04/2013	0169/BenPen-DPKA/IV/2013	167.500,00
24/04/2013	0170/BenPen-DPKA/IV/2013	165.000,00
24/04/2013	0172/BenPen-DPKA/IV/2013	200.000,00
24/04/2013	0173/BenPen-DPKA/IV/2013	180.000,00
24/04/2013	0190/BenPen-DPKA/IV/2013	120.000,00
24/04/2013	0222/BenPen-DPKA/IV/2013	3.165.750,00
25/04/2013	0176/BenPen-DPKA/IV/2013	1.777.500,00
26/04/2013	0191/BenPen-DPKA/IV/2013	1.877.800,00
29/04/2013	0164/BenPen-DPKA/IV/2013	1.449.500,00
29/04/2013	0167/BenPen-DPKA/IV/2013	1.300.000,00
30/04/2013	0165/BenPen-DPKA/IV/2013	1.500.000,00
30/04/2013	0166/BenPen-DPKA/IV/2013	2.024.250,00
01/05/2013	0206/BenPen-DPKA/V/2013	675.000,00
02/05/2013	0197/BenPen-DPKA/V/2013	68.000,00
02/05/2013	0198/BenPen-DPKA/V/2013	149.000,00
02/05/2013	0199/BenPen-DPKA/V/2013	55.400,00
02/05/2013	0200/BenPen-DPKA/V/2013	149.000,00
02/05/2013	0201/BenPen-DPKA/V/2013	149.000,00
02/05/2013	0202/BenPen-DPKA/V/2013	44.000,00
02/05/2013	0203/BenPen-DPKA/V/2013	443.000,00
07/05/2013	0204/BenPen-DPKA/V/2013	997.500,00
07/05/2013	0205/BenPen-DPKA/V/2013	3.263.900,00
07/05/2013	0244/BenPen-DPKA/V/2013	3.375.000,00
08/05/2013	0207/BenPen-DPKA/V/2013	804.750,00
08/05/2013	0208/BenPen-DPKA/V/2013	9.866.500,00
08/05/2013	0209/BenPen-DPKA/V/2013	392.500,00
10/05/2013	0210/BenPen-DPKA/V/2013	18.848.200,00
13/05/2013	0211/BenPen-DPKA/V/2013	649.500,00
13/05/2013	0212/BenPen-DPKA/V/2013	1.499.500,00
13/05/2013	0213/BenPen-DPKA/V/2013	360.000,00
13/05/2013	0214/BenPen-DPKA/V/2013	70.000,00
13/05/2013	0215/BenPen-DPKA/V/2013	180.000,00
14/05/2013	0216/BenPen-DPKA/V/2013	180.000,00
14/05/2013	0217/BenPen-DPKA/V/2013	460.000,00
14/05/2013	0218/BenPen-DPKA/V/2013	350.000,00
14/05/2013	0243/BenPen-DPKA/V/2013	350.000,00
16/05/2013	0219/BenPen-DPKA/V/2013	1.158.000,00
17/05/2013	0220/BenPen-DPKA/V/2013	800.000,00
17/05/2013	0226/BenPen-DPKA/V/2013	300.000,00
21/05/2013	0223/BenPen-DPKA/V/2013	13.500.000,00
21/05/2013	0224/BenPen-DPKA/V/2013	7.749.750,00
21/05/2013	0225/BenPen-DPKA/V/2013	2.426.250,00
21/05/2013	0254/BenPen-DPKA/V/2013	250.000,00
21/05/2013	0255/BenPen-DPKA/V/2013	450.000,00
22/05/2013	0230/BenPen-DPKA/V/2013	211.500,00
22/05/2013	0231/BenPen-DPKA/V/2013	45.000,00
22/05/2013	0232/BenPen-DPKA/V/2013	45.000,00
22/05/2013	0233/BenPen-DPKA/V/2013	45.000,00
22/05/2013	0234/BenPen-DPKA/V/2013	181.500,00
22/05/2013	0235/BenPen-DPKA/V/2013	45.000,00
22/05/2013	0236/BenPen-DPKA/V/2013	45.000,00
22/05/2013	0237/BenPen-DPKA/V/2013	45.000,00
24/05/2013	0238/BenPen-DPKA/V/2013	13.940.400,00
24/05/2013	0239/BenPen-DPKA/V/2013	8.569.950,00
24/05/2013	0240/BenPen-DPKA/V/2013	19.562.500,00
27/05/2013	0267/BenPen-DPKA/V/2013	1.460.000,00
28/05/2013	0241/BenPen-DPKA/V/2013	984.000,00
28/05/2013	0242/BenPen-DPKA/V/2013	652.000,00
29/05/2013	0248/BenPen-DPKA/V/2013	1.550.000,00
29/05/2013	0249/BenPen-DPKA/V/2013	13.053.950,00
29/05/2013	0250/BenPen-DPKA/V/2013	4.132.000,00
29/05/2013	0251/BenPen-DPKA/V/2013	2.743.850,00
29/05/2013	0252/BenPen-DPKA/V/2013	2.123.000,00
29/05/2013	0253/BenPen-DPKA/V/2013	100.000,00



29/05/2013	0256/BenPen-DPKA/V/2013	246.200,00
29/05/2013	0257/BenPen-DPKA/V/2013	500.000,00
30/05/2013	0259/BenPen-DPKA/V/2013	1.574.800,00
30/05/2013	0260/BenPen-DPKA/V/2013	978.200,00
30/05/2013	0262/BenPen-DPKA/V/2013	362.500,00
31/05/2013	0263/BenPen-DPKA/V/2013	702.000,00
31/05/2013	0264/BenPen-DPKA/V/2013	4.200.000,00
31/05/2013	0265/BenPen-DPKA/V/2013	9.600.000,00
31/05/2013	0266/BenPen-DPKA/V/2013	4.946.250,00
04/06/2013	0370/BenPen-DPKA/VI/2013	2.162.500,00
05/06/2013	0371/BenPen-DPKA/VI/2013	362.100,00
05/06/2013	0372/BenPen-DPKA/VI/2013	5.764.690,00
05/06/2013	0379/BenPen-DPKA/VI/2013	180.000,00
10/06/2013	0374/BenPen-DPKA/VI/2013	105.000,00
10/06/2013	0380/BenPen-DPKA/VI/2013	1.125.000,00
18/06/2013	0396/BenPen-DPKA/VI/2013	330.000,00
18/06/2013	0397/BenPen-DPKA/VI/2013	328.500,00
18/06/2013	0398/BenPen-DPKA/VI/2013	321.000,00
18/06/2013	0423/BenPen-DPKA/VI/2013	2.000.000,00
19/06/2013	0402/BenPen-DPKA/VI/2013	399.600,00
19/06/2013	0422/BenPen-DPKA/VI/2013	25.000,00
21/06/2013	0411/BenPen-DPKA/VI/2013	396.000,00
24/06/2013	0404/BenPen-DPKA/VI/2013	500.000,00
24/06/2013	0405/BenPen-DPKA/VI/2013	849.000,00
25/06/2013	0406/BenPen-DPKA/VI/2013	1.299.000,00
25/06/2013	0412/BenPen-DPKA/VI/2013	920.000,00
25/06/2013	0413/BenPen-DPKA/VI/2013	70.000,00
25/06/2013	0414/BenPen-DPKA/VI/2013	1.092.000,00
25/06/2013	0415/BenPen-DPKA/VI/2013	1.500.000,00
25/06/2013	0416/BenPen-DPKA/VI/2013	70.000,00
25/06/2013	0417/BenPen-DPKA/VI/2013	1.044.000,00
26/06/2013	0419/BenPen-DPKA/VI/2013	1.677.272,00
26/06/2013	0420/BenPen-DPKA/VI/2013	226.431,00
26/06/2013	0421/BenPen-DPKA/VI/2013	127.500,00
28/06/2013	0409/BenPen-DPKA/VI/2013	15.514.350,00
28/06/2013	0410/BenPen-DPKA/VI/2013	17.999.700,00
01/07/2013	0425/BenPen-DPKA/VII/2013	1.500.000,00
01/07/2013	0429/BenPen-DPKA/VII/2013	876.000,00
02/07/2013	0430/BenPen-DPKA/VII/2013	2.180.000,00
02/07/2013	0431/BenPen-DPKA/VII/2013	602.000,00
02/07/2013	0432/BenPen-DPKA/VII/2013	560.000,00
02/07/2013	0433/BenPen-DPKA/VII/2013	3.609.375,00
02/07/2013	0434/BenPen-DPKA/VII/2013	4.921.875,00
02/07/2013	0435/BenPen-DPKA/VII/2013	4.156.250,00
02/07/2013	0436/BenPen-DPKA/VII/2013	4.812.500,00
03/07/2013	0437/BenPen-DPKA/VII/2013	1.876.000,00
04/07/2013	0438/BenPen-DPKA/VII/2013	150.000,00
04/07/2013	0439/BenPen-DPKA/VII/2013	70.000,00
04/07/2013	0440/BenPen-DPKA/VII/2013	70.000,00
04/07/2013	0441/BenPen-DPKA/VII/2013	60.000,00
04/07/2013	0442/BenPen-DPKA/VII/2013	1.999.500,00
08/07/2013	0426/BenPen-DPKA/VII/2013	1.935.000,00
09/07/2013	0428/BenPen-DPKA/VII/2013	132.000,00
09/07/2013	0447/BenPen-DPKA/VII/2013	132.000,00
09/07/2013	0448/BenPen-DPKA/VII/2013	118.000,00
09/07/2013	0449/BenPen-DPKA/VII/2013	118.000,00
09/07/2013	0450/BenPen-DPKA/VII/2013	40.000,00
09/07/2013	0451/BenPen-DPKA/VII/2013	20.000,00
09/07/2013	0452/BenPen-DPKA/VII/2013	50.000,00
10/07/2013	0453/BenPen-DPKA/VII/2013	4.000.000,00
10/07/2013	0454/BenPen-DPKA/VII/2013	159.000,00
10/07/2013	0455/BenPen-DPKA/VII/2013	159.000,00
10/07/2013	0456/BenPen-DPKA/VII/2013	159.000,00
10/07/2013	0457/BenPen-DPKA/VII/2013	159.000,00

10/07/2013	0458/BenPen-DPKA/VII/2013	159.000,00
10/07/2013	0459/BenPen-DPKA/VII/2013	159.000,00
11/07/2013	0427/BenPen-DPKA/VII/2013	309.000,00
11/07/2013	0460/BenPen-DPKA/VII/2013	7.500.000,00
11/07/2013	0461/BenPen-DPKA/VII/2013	3.784.000,00
15/07/2013	0462/BenPen-DPKA/VII/2013	1.145.750,00
15/07/2013	0463/BenPen-DPKA/VII/2013	1.057.500,00
15/07/2013	0466/BenPen-DPKA/VII/2013	720.000,00
16/07/2013	0470/BenPen-DPKA/VII/2013	30.000,00
16/07/2013	0471/BenPen-DPKA/VII/2013	80.000,00
17/07/2013	0464/BenPen-DPKA/VII/2013	140.000,00
17/07/2013	0465/BenPen-DPKA/VII/2013	500.000,00
17/07/2013	0467/BenPen-DPKA/VII/2013	525.300,00
17/07/2013	0468/BenPen-DPKA/VII/2013	180.000,00
17/07/2013	0473/BenPen-DPKA/VII/2013	637.000,00
17/07/2013	0474/BenPen-DPKA/VII/2013	594.000,00
17/07/2013	0475/BenPen-DPKA/VII/2013	450.000,00
17/07/2013	0476/BenPen-DPKA/VII/2013	119.000,00
17/07/2013	0477/BenPen-DPKA/VII/2013	2.250.000,00
17/07/2013	0478/BenPen-DPKA/VII/2013	234.000,00
17/07/2013	0479/BenPen-DPKA/VII/2013	2.184.000,00
17/07/2013	0480/BenPen-DPKA/VII/2013	262.500,00
17/07/2013	0481/BenPen-DPKA/VII/2013	440.000,00
18/07/2013	0469/BenPen-DPKA/VII/2013	750.000,00
18/07/2013	0482/BenPen-DPKA/VII/2013	1.269.600,00
19/07/2013	0483/BenPen-DPKA/VII/2013	666.500,00
19/07/2013	0484/BenPen-DPKA/VII/2013	774.000,00
23/07/2013	0472/BenPen-DPKA/VII/2013	168.750,00
23/07/2013	0487/BenPen-DPKA/VII/2013	135.000,00
26/07/2013	0489/BenPen-DPKA/VII/2013	696.000,00
26/07/2013	0490/BenPen-DPKA/VII/2013	3.130.000,00
26/07/2013	0491/BenPen-DPKA/VII/2013	360.000,00
26/07/2013	0492/BenPen-DPKA/VII/2013	2.445.000,00
29/07/2013	0493/BenPen-DPKA/VII/2013	1.395.750,00
29/07/2013	0494/BenPen-DPKA/VII/2013	72.000,00
29/07/2013	0495/BenPen-DPKA/VII/2013	72.000,00
29/07/2013	0496/BenPen-DPKA/VII/2013	1.962.100,00
29/07/2013	0497/BenPen-DPKA/VII/2013	315.000,00
29/07/2013	0498/BenPen-DPKA/VII/2013	1.098.000,00
29/07/2013	0499/BenPen-DPKA/VII/2013	549.750,00
29/07/2013	0512/BenPen-DPKA/VII/2013	105.000,00
29/07/2013	0513/BenPen-DPKA/VII/2013	180.600,00
29/07/2013	0514/BenPen-DPKA/VII/2013	116.000,00
29/07/2013	0515/BenPen-DPKA/VII/2013	130.000,00
29/07/2013	0531/BenPen-DPKA/VII/2013	33.000,00
30/07/2013	0503/BenPen-DPKA/VII/2013	146.500,00
30/07/2013	0504/BenPen-DPKA/VII/2013	146.250,00
30/07/2013	0505/BenPen-DPKA/VII/2013	153.750,00
30/07/2013	0506/BenPen-DPKA/VII/2013	176.250,00
30/07/2013	0507/BenPen-DPKA/VII/2013	135.000,00
30/07/2013	0508/BenPen-DPKA/VII/2013	131.250,00
30/07/2013	0509/BenPen-DPKA/VII/2013	153.750,00
30/07/2013	0511/BenPen-DPKA/VII/2013	3.599.600,00
30/07/2013	0529/BenPen-DPKA/VII/2013	81.600,00
31/07/2013	0500/BenPen-DPKA/VII/2013	1.864.300,00
31/07/2013	0510/BenPen-DPKA/VII/2013	1.371.000,00
31/07/2013	0520/BenPen-DPKA/VII/2013	150.000,00
31/07/2013	0521/BenPen-DPKA/VII/2013	166.000,00
31/07/2013	0530/BenPen-DPKA/VII/2013	289.000,00
01/08/2013	0517/BenPen-DPKA/VIII/2013	2.625.000,00
01/08/2013	0519/BenPen-DPKA/VIII/2013	1.207.500,00
01/08/2013	0542/BenPen-DPKA/VIII/2013	31.500,00
02/08/2013	0518/BenPen-DPKA/VIII/2013	666.000,00
14/08/2013	0522/BenPen-DPKA/VIII/2013	148.500,00



14/08/2013	0523/BenPen-DPKA/VIII/2013	145.000,00
14/08/2013	0524/BenPen-DPKA/VIII/2013	145.000,00
14/08/2013	0525/BenPen-DPKA/VIII/2013	200.000,00
14/08/2013	0526/BenPen-DPKA/VIII/2013	200.000,00
14/08/2013	0527/BenPen-DPKA/VIII/2013	200.000,00
14/08/2013	0528/BenPen-DPKA/VIII/2013	200.000,00
16/08/2013	0546/BenPen-DPKA/VIII/2013	600.000,00
20/08/2013	0538/BenPen-DPKA/VIII/2013	400.000,00
20/08/2013	0547/BenPen-DPKA/VIII/2013	13.500.000,00
21/08/2013	0537/BenPen-DPKA/VIII/2013	370.000,00
21/08/2013	0539/BenPen-DPKA/VIII/2013	393.450,00
21/08/2013	0540/BenPen-DPKA/VIII/2013	393.450,00
21/08/2013	0541/BenPen-DPKA/VIII/2013	339.700,00
22/08/2013	0532/BenPen-DPKA/VIII/2013	100.000,00
22/08/2013	0533/BenPen-DPKA/VIII/2013	50.000,00
22/08/2013	0534/BenPen-DPKA/VIII/2013	50.000,00
22/08/2013	0535/BenPen-DPKA/VIII/2013	15.000,00
22/08/2013	0536/BenPen-DPKA/VIII/2013	80.000,00
22/08/2013	0548/BenPen-DPKA/VIII/2013	375.000,00
22/08/2013	0549/BenPen-DPKA/VIII/2013	75.000,00
22/08/2013	0550/BenPen-DPKA/VIII/2013	50.000,00
22/08/2013	0551/BenPen-DPKA/VIII/2013	50.000,00
22/08/2013	0552/BenPen-DPKA/VIII/2013	50.000,00
27/08/2013	0553/BenPen-DPKA/VIII/2013	535.000,00
27/08/2013	0554/BenPen-DPKA/VIII/2013	1.800.000,00
27/08/2013	0555/BenPen-DPKA/VIII/2013	1.487.500,00
29/08/2013	0564/BenPen-DPKA/VIII/2013	1.301.182,00
29/08/2013	0565/BenPen-DPKA/VIII/2013	973.000,00
30/08/2013	0563/BenPen-DPKA/VIII/2013	890.000,00
30/08/2013	0566/BenPen-DPKA/VIII/2013	100.000,00
30/08/2013	0567/BenPen-DPKA/VIII/2013	273.600,00
30/08/2013	0568/BenPen-DPKA/VIII/2013	480.000,00
02/09/2013	0575/BenPen-DPKA/IX/2013	1.539.900,00
02/09/2013	0576/BenPen-DPKA/IX/2013	3.000.000,00
02/09/2013	0577/BenPen-DPKA/IX/2013	2.600.000,00
02/09/2013	0578/BenPen-DPKA/IX/2013	2.800.000,00
02/09/2013	0579/BenPen-DPKA/IX/2013	237.800,00
02/09/2013	0580/BenPen-DPKA/IX/2013	1.508.000,00
02/09/2013	0581/BenPen-DPKA/IX/2013	881.600,00
02/09/2013	0582/BenPen-DPKA/IX/2013	800.000,00
02/09/2013	0583/BenPen-DPKA/IX/2013	6.760.000,00
02/09/2013	0584/BenPen-DPKA/IX/2013	2.106.803,00
02/09/2013	0585/BenPen-DPKA/IX/2013	575.000,00
02/09/2013	0586/BenPen-DPKA/IX/2013	1.299.200,00
02/09/2013	0587/BenPen-DPKA/IX/2013	899.000,00
02/09/2013	0588/BenPen-DPKA/IX/2013	696.000,00
03/09/2013	0557/BenPen-DPKA/IX/2013	159.000,00
03/09/2013	0558/BenPen-DPKA/IX/2013	159.000,00
03/09/2013	0559/BenPen-DPKA/IX/2013	159.000,00
03/09/2013	0560/BenPen-DPKA/IX/2013	159.000,00
03/09/2013	0561/BenPen-DPKA/IX/2013	159.000,00
03/09/2013	0562/BenPen-DPKA/IX/2013	159.000,00
05/09/2013	0569/BenPen-DPKA/IX/2013	7.734.300,00
09/09/2013	0570/BenPen-DPKA/IX/2013	899.250,00
09/09/2013	0572/BenPen-DPKA/IX/2013	1.893.200,00
09/09/2013	0573/BenPen-DPKA/IX/2013	8.382.450,00
09/09/2013	0589/BenPen-DPKA/IX/2013	749.600,00
09/09/2013	0590/BenPen-DPKA/IX/2013	1.200.000,00
09/09/2013	0591/BenPen-DPKA/IX/2013	3.000.000,00
12/09/2013	0571/BenPen-DPKA/IX/2013	188.800,00
16/09/2013	0592/BenPen-DPKA/IX/2013	90.000,00
16/09/2013	0593/BenPen-DPKA/IX/2013	10.000,00
16/09/2013	0594/BenPen-DPKA/IX/2013	10.000,00
16/09/2013	0595/BenPen-DPKA/IX/2013	90.909,00

16/09/2013	0596/BenPen-DPKA/IX/2013	90.000,00
16/09/2013	0597/BenPen-DPKA/IX/2013	420.000,00
17/09/2013	0601/BenPen-DPKA/IX/2013	50.000,00
17/09/2013	0602/BenPen-DPKA/IX/2013	345.000,00
18/09/2013	0599/BenPen-DPKA/IX/2013	999.750,00
18/09/2013	0600/BenPen-DPKA/IX/2013	22.000,00
19/09/2013	0603/BenPen-DPKA/IX/2013	374.700,00
19/09/2013	0604/BenPen-DPKA/IX/2013	264.000,00
19/09/2013	0605/BenPen-DPKA/IX/2013	300.000,00
19/09/2013	0606/BenPen-DPKA/IX/2013	450.000,00
19/09/2013	0607/BenPen-DPKA/IX/2013	50.000,00
19/09/2013	0608/BenPen-DPKA/IX/2013	50.000,00
19/09/2013	0609/BenPen-DPKA/IX/2013	25.000,00
19/09/2013	0610/BenPen-DPKA/IX/2013	50.000,00
19/09/2013	0611/BenPen-DPKA/IX/2013	50.000,00
19/09/2013	0612/BenPen-DPKA/IX/2013	50.000,00
23/09/2013	0614/BenPen-DPKA/IX/2013	700.000,00
23/09/2013	0615/BenPen-DPKA/IX/2013	2.074.800,00
25/09/2013	0620/BenPen-DPKA/IX/2013	6.237.000,00
25/09/2013	0621/BenPen-DPKA/IX/2013	4.889.500,00
25/09/2013	0622/BenPen-DPKA/IX/2013	6.569.000,00
25/09/2013	0623/BenPen-DPKA/IX/2013	15.934.900,00
25/09/2013	0624/BenPen-DPKA/IX/2013	4.911.400,00
26/09/2013	0627/BenPen-DPKA/IX/2013	102.000,00
26/09/2013	0628/BenPen-DPKA/IX/2013	102.000,00
27/09/2013	0617/BenPen-DPKA/IX/2013	110.000,00
27/09/2013	0618/BenPen-DPKA/IX/2013	154.000,00
27/09/2013	0619/BenPen-DPKA/IX/2013	103.400,00
27/09/2013	0625/BenPen-DPKA/IX/2013	174.000,00
30/09/2013	0626/BenPen-DPKA/IX/2013	150.400,00
02/10/2013	0630/BenPen-DPKA/X/2013	92.800,00
02/10/2013	0631/BenPen-DPKA/X/2013	90.300,00
02/10/2013	0632/BenPen-DPKA/X/2013	198.400,00
02/10/2013	0633/BenPen-DPKA/X/2013	999.200,00
02/10/2013	0634/BenPen-DPKA/X/2013	774.300,00
02/10/2013	0635/BenPen-DPKA/X/2013	256.000,00
03/10/2013	0636/BenPen-DPKA/X/2013	278.000,00
03/10/2013	0637/BenPen-DPKA/X/2013	6.241.500,00
03/10/2013	0638/BenPen-DPKA/X/2013	1.450.000,00
03/10/2013	0639/BenPen-DPKA/X/2013	2.271.750,00
04/10/2013	0640/BenPen-DPKA/X/2013	400.000,00
04/10/2013	0641/BenPen-DPKA/X/2013	750.000,00
04/10/2013	0642/BenPen-DPKA/X/2013	1.000.000,00
04/10/2013	0643/BenPen-DPKA/X/2013	750.000,00
04/10/2013	0644/BenPen-DPKA/X/2013	400.000,00
08/10/2013	0646/BenPen-DPKA/X/2013	4.915.500,00
09/10/2013	0645/BenPen-DPKA/X/2013	72.000,00
10/10/2013	0647/BenPen-DPKA/X/2013	150.400,00
10/10/2013	0648/BenPen-DPKA/X/2013	150.400,00
11/10/2013	0654/BenPen-DPKA/X/2013	649.700,00
11/10/2013	0685/BenPen-DPKA/X/2013	560.000,00
16/10/2013	0649/BenPen-DPKA/X/2013	1.307.602,00
16/10/2013	0660/BenPen-DPKA/X/2013	938.000,00
16/10/2013	0661/BenPen-DPKA/X/2013	468.000,00
16/10/2013	0662/BenPen-DPKA/X/2013	20.000,00
17/10/2013	0663/BenPen-DPKA/X/2013	90.000,00
17/10/2013	0664/BenPen-DPKA/X/2013	90.000,00
17/10/2013	0665/BenPen-DPKA/X/2013	87.000,00
17/10/2013	0666/BenPen-DPKA/X/2013	87.000,00
17/10/2013	0667/BenPen-DPKA/X/2013	60.000,00
17/10/2013	0668/BenPen-DPKA/X/2013	60.000,00
21/10/2013	0650/BenPen-DPKA/X/2013	499.500,00
21/10/2013	0651/BenPen-DPKA/X/2013	100.000,00
21/10/2013	0652/BenPen-DPKA/X/2013	934.200,00

21/10/2013	0655/BenPen-DPKA/X/2013	51.300,00
21/10/2013	0656/BenPen-DPKA/X/2013	74.850,00
21/10/2013	0657/BenPen-DPKA/X/2013	74.850,00
21/10/2013	0658/BenPen-DPKA/X/2013	439.000,00
21/10/2013	0659/BenPen-DPKA/X/2013	570.000,00
24/10/2013	0670/BenPen-DPKA/X/2013	1.884.000,00
28/10/2013	0673/BenPen-DPKA/X/2013	124.500,00
28/10/2013	0674/BenPen-DPKA/X/2013	1.814.500,00
28/10/2013	0675/BenPen-DPKA/X/2013	1.500.000,00
31/10/2013	0677/BenPen-DPKA/X/2013	125.300,00
31/10/2013	0678/BenPen-DPKA/X/2013	480.000,00
31/10/2013	0679/BenPen-DPKA/X/2013	36.000,00
31/10/2013	0680/BenPen-DPKA/X/2013	33.000,00
31/10/2013	0686/BenPen-DPKA/X/2013	1.062.000,00
04/11/2013	0692/BenPen-DPKA/XI/2013	800.000,00
04/11/2013	0693/BenPen-DPKA/XI/2013	1.140.000,00
06/11/2013	0694/BenPen-DPKA/XI/2013	345.600,00
06/11/2013	0695/BenPen-DPKA/XI/2013	312.500,00
06/11/2013	0696/BenPen-DPKA/XI/2013	312.500,00
06/11/2013	0697/BenPen-DPKA/XI/2013	312.500,00
06/11/2013	0699/BenPen-DPKA/XI/2013	540.000,00
07/11/2013	0700/BenPen-DPKA/XI/2013	995.000,00
08/11/2013	0701/BenPen-DPKA/XI/2013	1.093.500,00
11/11/2013	0702/BenPen-DPKA/XI/2013	1.829.806,00
11/11/2013	0703/BenPen-DPKA/XI/2013	30.825,00
11/11/2013	0704/BenPen-DPKA/XI/2013	67.500,00
12/11/2013	0705/BenPen-DPKA/XI/2013	113.750,00
12/11/2013	0706/BenPen-DPKA/XI/2013	870.000,00
12/11/2013	0707/BenPen-DPKA/XI/2013	800.000,00
12/11/2013	0708/BenPen-DPKA/XI/2013	800.000,00
12/11/2013	0709/BenPen-DPKA/XI/2013	174.000,00
13/11/2013	0710/BenPen-DPKA/XI/2013	828.500,00
13/11/2013	0711/BenPen-DPKA/XI/2013	2.884.700,00
13/11/2013	0712/BenPen-DPKA/XI/2013	112.400,00
14/11/2013	0714/BenPen-DPKA/XI/2013	6.700.000,00
14/11/2013	0716/BenPen-DPKA/XI/2013	214.000,00
18/11/2013	0717/BenPen-DPKA/XI/2013	1.395.000,00
18/11/2013	0718/BenPen-DPKA/XI/2013	1.359.000,00
19/11/2013	0719/BenPen-DPKA/XI/2013	281.250,00
19/11/2013	0721/BenPen-DPKA/XI/2013	120.000,00
20/11/2013	0722/BenPen-DPKA/XI/2013	371.900,00
21/11/2013	0723/BenPen-DPKA/XI/2013	1.251.650,00
22/11/2013	0724/BenPen-DPKA/XI/2013	120.000,00
22/11/2013	0725/BenPen-DPKA/XI/2013	1.874.000,00
22/11/2013	0726/BenPen-DPKA/XI/2013	2.000.000,00
25/11/2013	0729/BenPen-DPKA/XI/2013	356.091,00
25/11/2013	0738/BenPen-DPKA/XI/2013	125.000,00
25/11/2013	0739/BenPen-DPKA/XI/2013	125.000,00
25/11/2013	0740/BenPen-DPKA/XI/2013	25.000,00
25/11/2013	0741/BenPen-DPKA/XI/2013	400.000,00
25/11/2013	0742/BenPen-DPKA/XI/2013	100.000,00
25/11/2013	0743/BenPen-DPKA/XI/2013	60.000,00
27/11/2013	0731/BenPen-DPKA/XI/2013	373.000,00
27/11/2013	0732/BenPen-DPKA/XI/2013	100.000,00
27/11/2013	0733/BenPen-DPKA/XI/2013	50.000,00
27/11/2013	0734/BenPen-DPKA/XI/2013	45.000,00
27/11/2013	0735/BenPen-DPKA/XI/2013	60.000,00
28/11/2013	0730/BenPen-DPKA/XI/2013	3.098.800,00
28/11/2013	0737/BenPen-DPKA/XI/2013	111.309,00
28/11/2013	0744/BenPen-DPKA/XI/2013	70.000,00
02/12/2013	0746/BenPen-DPKA/XII/2013	255.000,00
02/12/2013	0747/BenPen-DPKA/XII/2013	244.500,00
02/12/2013	0748/BenPen-DPKA/XII/2013	1.875.000,00
02/12/2013	0749/BenPen-DPKA/XII/2013	600.000,00



02/12/2013	0750/BenPen-DPKA/XII/2013	466.000,00
03/12/2013	0751/BenPen-DPKA/XII/2013	803.000,00
04/12/2013	0752/BenPen-DPKA/XII/2013	3.500.000,00
04/12/2013	0753/BenPen-DPKA/XII/2013	297.000,00
04/12/2013	0754/BenPen-DPKA/XII/2013	103.400,00
04/12/2013	0755/BenPen-DPKA/XII/2013	240.000,00
04/12/2013	0756/BenPen-DPKA/XII/2013	225.000,00
04/12/2013	0757/BenPen-DPKA/XII/2013	101.200,00
04/12/2013	0758/BenPen-DPKA/XII/2013	108.000,00
04/12/2013	0759/BenPen-DPKA/XII/2013	103.400,00
04/12/2013	0760/BenPen-DPKA/XII/2013	110.000,00
04/12/2013	0761/BenPen-DPKA/XII/2013	114.400,00
04/12/2013	0762/BenPen-DPKA/XII/2013	608.600,00
05/12/2013	0763/BenPen-DPKA/XII/2013	125.000,00
05/12/2013	0764/BenPen-DPKA/XII/2013	225.000,00
05/12/2013	0765/BenPen-DPKA/XII/2013	87.200,00
05/12/2013	0766/BenPen-DPKA/XII/2013	500.000,00
05/12/2013	0767/BenPen-DPKA/XII/2013	570.000,00
05/12/2013	0768/BenPen-DPKA/XII/2013	540.000,00
05/12/2013	0769/BenPen-DPKA/XII/2013	490.000,00
05/12/2013	0770/BenPen-DPKA/XII/2013	243.000,00
05/12/2013	0771/BenPen-DPKA/XII/2013	1.707.500,00
05/12/2013	0772/BenPen-DPKA/XII/2013	1.199.250,00
05/12/2013	0773/BenPen-DPKA/XII/2013	1.000.000,00
06/12/2013	0775/BenPen-DPKA/XII/2013	1.735.900,00
09/12/2013	0778/BenPen-DPKA/XII/2013	1.089.100,00
10/12/2013	0780/BenPen-DPKA/XII/2013	170.000,00
11/12/2013	0782/BenPen-DPKA/XII/2013	900.000,00
11/12/2013	0783/BenPen-DPKA/XII/2013	146.250,00
11/12/2013	0891/BenPen-DPKA/XII/2013	1.638.000,00
11/12/2013	0892/BenPen-DPKA/XII/2013	1.599.750,00
12/12/2013	0881/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
12/12/2013	0893/BenPen-DPKA/XII/2013	1.280.000,00
13/12/2013	0781/BenPen-DPKA/XII/2013	173.000,00
13/12/2013	0894/BenPen-DPKA/XII/2013	60.000,00
16/12/2013	0784/BenPen-DPKA/XII/2013	499.500,00
16/12/2013	0895/BenPen-DPKA/XII/2013	125.000,00
16/12/2013	0896/BenPen-DPKA/XII/2013	244.000,00
16/12/2013	0897/BenPen-DPKA/XII/2013	270.000,00
16/12/2013	0898/BenPen-DPKA/XII/2013	1.500.000,00
17/12/2013	0808/BenPen-DPKA/XII/2013	772.000,00
17/12/2013	0809/BenPen-DPKA/XII/2013	300.800,00
18/12/2013	0785/BenPen-DPKA/XII/2013	1.506.875,00
18/12/2013	0787/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
18/12/2013	0788/BenPen-DPKA/XII/2013	60.000,00
18/12/2013	0789/BenPen-DPKA/XII/2013	125.000,00
18/12/2013	0790/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
18/12/2013	0791/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
18/12/2013	0792/BenPen-DPKA/XII/2013	60.000,00
18/12/2013	0793/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
18/12/2013	0794/BenPen-DPKA/XII/2013	150.000,00
18/12/2013	0795/BenPen-DPKA/XII/2013	60.000,00
18/12/2013	0796/BenPen-DPKA/XII/2013	150.000,00
18/12/2013	0823/BenPen-DPKA/XII/2013	49.500,00
18/12/2013	0824/BenPen-DPKA/XII/2013	87.000,00
18/12/2013	0825/BenPen-DPKA/XII/2013	87.000,00
18/12/2013	0826/BenPen-DPKA/XII/2013	81.000,00
18/12/2013	0827/BenPen-DPKA/XII/2013	49.500,00
18/12/2013	0828/BenPen-DPKA/XII/2013	46.500,00
18/12/2013	0829/BenPen-DPKA/XII/2013	125.000,00
18/12/2013	0830/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
18/12/2013	0831/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
18/12/2013	0832/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
18/12/2013	0833/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00



18/12/2013	0834/BenPen-DPKA/XII/2013	30.000,00
18/12/2013	0835/BenPen-DPKA/XII/2013	50.000,00
18/12/2013	0836/BenPen-DPKA/XII/2013	50.000,00
18/12/2013	0837/BenPen-DPKA/XII/2013	400.000,00
18/12/2013	0882/BenPen-DPKA/XII/2013	1.249.000,00
19/12/2013	0899/BenPen-DPKA/XII/2013	231.500,00
20/12/2013	0786/BenPen-DPKA/XII/2013	500.000,00
20/12/2013	0797/BenPen-DPKA/XII/2013	1.700.000,00
20/12/2013	0798/BenPen-DPKA/XII/2013	145.000,00
23/12/2013	0800/BenPen-DPKA/XII/2013	150.000,00
23/12/2013	0801/BenPen-DPKA/XII/2013	500.000,00
23/12/2013	0802/BenPen-DPKA/XII/2013	1.100.000,00
23/12/2013	0803/BenPen-DPKA/XII/2013	90.300,00
23/12/2013	0804/BenPen-DPKA/XII/2013	20.000,00
23/12/2013	0805/BenPen-DPKA/XII/2013	68.800,00
23/12/2013	0854/BenPen-DPKA/XII/2013	78.125,00
23/12/2013	0856/BenPen-DPKA/XII/2013	200.000,00
23/12/2013	0857/BenPen-DPKA/XII/2013	50.000,00
23/12/2013	0858/BenPen-DPKA/XII/2013	50.000,00
23/12/2013	0859/BenPen-DPKA/XII/2013	50.000,00
23/12/2013	0867/BenPen-DPKA/XII/2013	501.000,00
24/12/2013	0806/BenPen-DPKA/XII/2013	1.100.000,00
24/12/2013	0810/BenPen-DPKA/XII/2013	2.320.000,00
24/12/2013	0811/BenPen-DPKA/XII/2013	564.600,00
24/12/2013	0812/BenPen-DPKA/XII/2013	5.916.000,00
24/12/2013	0813/BenPen-DPKA/XII/2013	1.364.000,00
24/12/2013	0814/BenPen-DPKA/XII/2013	548.100,00
24/12/2013	0815/BenPen-DPKA/XII/2013	1.000.000,00
24/12/2013	0816/BenPen-DPKA/XII/2013	720.000,00
24/12/2013	0817/BenPen-DPKA/XII/2013	1.500.000,00
24/12/2013	0818/BenPen-DPKA/XII/2013	99.750,00
24/12/2013	0819/BenPen-DPKA/XII/2013	1.250.000,00
24/12/2013	0820/BenPen-DPKA/XII/2013	499.500,00
24/12/2013	0821/BenPen-DPKA/XII/2013	1.500.000,00
24/12/2013	0822/BenPen-DPKA/XII/2013	1.200.000,00
27/12/2013	0838/BenPen-DPKA/XII/2013	500.000,00
27/12/2013	0839/BenPen-DPKA/XII/2013	153.800,00
27/12/2013	0840/BenPen-DPKA/XII/2013	2.284.500,00
27/12/2013	0841/BenPen-DPKA/XII/2013	2.136.000,00
27/12/2013	0842/BenPen-DPKA/XII/2013	999.750,00
27/12/2013	0843/BenPen-DPKA/XII/2013	449.250,00
27/12/2013	0844/BenPen-DPKA/XII/2013	267.750,00
27/12/2013	0845/BenPen-DPKA/XII/2013	99.000,00
27/12/2013	0846/BenPen-DPKA/XII/2013	607.200,00
27/12/2013	0847/BenPen-DPKA/XII/2013	56.250,00
27/12/2013	0848/BenPen-DPKA/XII/2013	940.000,00
27/12/2013	0860/BenPen-DPKA/XII/2013	55.000,00
27/12/2013	0868/BenPen-DPKA/XII/2013	3.099.000,00
27/12/2013	0869/BenPen-DPKA/XII/2013	13.500.000,00
30/12/2013	0851/BenPen-DPKA/XII/2013	16.782.200,00
30/12/2013	0852/BenPen-DPKA/XII/2013	399.750,00
30/12/2013	0853/BenPen-DPKA/XII/2013	200.000,00
30/12/2013	0855/BenPen-DPKA/XII/2013	265.000,00
30/12/2013	0861/BenPen-DPKA/XII/2013	340.000,00
30/12/2013	0862/BenPen-DPKA/XII/2013	1.590.000,00
30/12/2013	0863/BenPen-DPKA/XII/2013	250.000,00
30/12/2013	0864/BenPen-DPKA/XII/2013	4.767.800,00
30/12/2013	0865/BenPen-DPKA/XII/2013	1.324.850,00
30/12/2013	0866/BenPen-DPKA/XII/2013	803.000,00
30/12/2013	0872/BenPen-DPKA/XII/2013	48.000,00
30/12/2013	0873/BenPen-DPKA/XII/2013	200.000,00
30/12/2013	0874/BenPen-DPKA/XII/2013	960.000,00
30/12/2013	0886/BenPen-DPKA/XII/2013	1.028.900,00
31/12/2013	0870/BenPen-DPKA/XII/2013	50.000,00



31/12/2013	0871/BenPen-DPKA/XII/2013	100.000,00
31/12/2013	0875/BenPen-DPKA/XII/2013	450.000,00
31/12/2013	0876/BenPen-DPKA/XII/2013	25.000,00
31/12/2013	0877/BenPen-DPKA/XII/2013	3.164.750,00
31/12/2013	0878/BenPen-DPKA/XII/2013	750.000,00
31/12/2013	0879/BenPen-DPKA/XII/2013	5.707.500,00
31/12/2013	0880/BenPen-DPKA/XII/2013	13.838.150,00
31/12/2013	0887/BenPen-DPKA/XII/2013	1.269.600,00
31/12/2013	0888/BenPen-DPKA/XII/2013	1.269.200,00
31/12/2013	0889/BenPen-DPKA/XII/2013	1.269.200,00
31/12/2013	0890/BenPen-DPKA/XII/2013	342.000,00
31/12/2013	0900/BenPen-DPKA/XII/2013	80.000,00
31/12/2013	993/PENUTUP/1.20.5.1/2013	(757.552.781,00)





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN

periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014

4 . 1 . 1 . 02

Pajak Restoran

4 . 1 . 1 . 02 .

02

Restoran

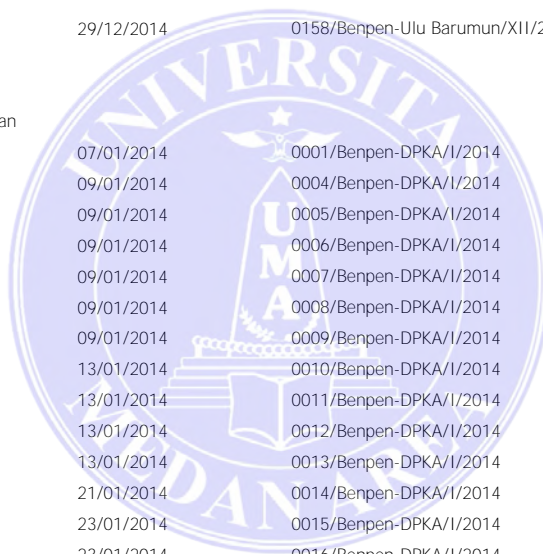
24/02/2014	0007/Benpen-Ulu Barumun/II/2014	100.000,00
19/03/2014	0001/Benpen-Barsel/III/2014	60.000,00
28/03/2014	0008/Benpen-Barteng/III/2014	475.000,00
03/04/2014	0011/Benpen-Barsel/IV/2014	60.000,00
07/04/2014	0005/BenPen-Huragi/IV/2014	70.000,00
10/04/2014	0031/Benpen-Ulu Barumun/IV/2014	100.000,00
16/04/2014	0005/Benpen-Aeknabara/IV/2014	400.000,00
16/04/2014	0034/Benpen-Ulu Barumun/IV/2014	100.000,00
17/04/2014	0004/BenPenSosopan/IV/2014	88.000,00
29/04/2014	0021/Benpen-Barteng/IV/2014	375.000,00
02/05/2014	0001/BenPenBatam/V/2014	855.000,00
06/05/2014	0014/Benpen-Barsel/V/2014	60.000,00
13/05/2014	0026/Benpen-Barteng/V/2014	200.000,00
14/05/2014	0014/Benpen-Sosa/V/2014	940.000,00
21/05/2014	0052/Benpen-Ulu Barumun/V/2014	100.000,00
23/05/2014	0005/BenPen-Lubuk Barumun/V/2014	2.500.000,00
28/05/2014	0059/Benpen-Ulu Barumun/V/2014	100.000,00
30/05/2014	0005/BenPenBatam/V/2014	297.000,00
02/06/2014	0012/BenPen-Huragi/VI/2014	590.000,00
03/06/2014	0067/Benpen-Ulu Barumun/VI/2014	1.385.000,00
04/06/2014	0025/Benpen-Barsel/VI/2014	60.000,00
04/06/2014	0027/Benpen-Barsel/VI/2014	400.000,00
06/06/2014	0010/BenPen-Lubuk Barumun/VI/2014	500.000,00
06/06/2014	0056/Benpen-Barumun/VI/2014	3.500.000,00
11/06/2014	0006.A/BenPenSosopan/VI/2014	328.000,00
11/06/2014	0017/BenPen-Huragi/VI/2014	1.405.000,00
11/06/2014	0022/Benpen-Sosa/VI/2014	400.000,00
11/06/2014	0032/Benpen-Barteng/VI/2014	300.000,00
30/06/2014	0013/Benpen-Aeknabara/VI/2014	800.000,00
21/07/2014	0008/Benpen-Sihapas/VII/2014	275.000,00
19/08/2014	0101/Benpen-Barumun/VIII/2014	50.000,00
19/08/2014	0102/Benpen-Barumun/VIII/2014	220.000,00
19/08/2014	0103/Benpen-Barumun/VIII/2014	200.000,00
19/08/2014	0104/Benpen-Barumun/VIII/2014	200.000,00
19/08/2014	0105/Benpen-Barumun/VIII/2014	30.000,00
19/08/2014	0106/Benpen-Barumun/VIII/2014	440.000,00
02/09/2014	0123/Benpen-Barumun/IX/2014	1.400.000,00
15/09/2014	0053/Benpen-Barteng/IX/2014	240.000,00
18/09/2014	0027/Benpen-Barsel/IX/2014	265.000,00
23/09/2014	0044/Benpen-Sosa/IX/2014	1.000.000,00
08/10/2014	0062/Benpen-Barteng/X/2014	165.000,00
16/10/2014	0052/Benpen-Sosa/X/2014	570.000,00
22/10/2014	0070/Benpen-Barteng/X/2014	808.000,00
27/10/2014	0126/Benpen-Ulu Barumun/X/2014	300.000,00
28/10/2014	0059/Benpen-Sosa/X/2014	500.000,00

28/10/2014	0166/Benpen-Barumun/X/2014	2.000.000,00
28/10/2014	0167/Benpen-Barumun/X/2014	420.000,00
30/10/2014	0023/Benpen-Aeknabara/X/2014	275.000,00
30/10/2014	0026/Benpen-Aeknabara/X/2014	330.000,00
30/10/2014	0027/Benpen-Aeknabara/X/2014	330.000,00
30/10/2014	0028/Benpen-Aeknabara/X/2014	385.000,00
30/10/2014	0029/Benpen-Aeknabara/X/2014	385.000,00
30/10/2014	0030/Benpen-Aeknabara/X/2014	10.000,00
30/10/2014	0130.A/Benpen-Ulu Barumun/X/2014	440.000,00
04/11/2014	0168/Benpen-Barumun/XI/2014	1.980.000,00
07/11/2014	0175/Benpen-Barumun/XI/2014	1.100.000,00
07/11/2014	0176/Benpen-Barumun/XI/2014	1.130.000,00
07/11/2014	0177/Benpen-Barumun/XI/2014	840.000,00
07/11/2014	0178/Benpen-Barumun/XI/2014	905.000,00
13/11/2014	0133/Benpen-Ulu Barumun/XI/2014	200.000,00
02/12/2014	0185/Benpen-Barumun/XII/2014	100.000,00
08/12/2014	0186/Benpen-Barumun/XII/2014	530.000,00
24/12/2014	0031/BenPenSosopan/XII/2014	167.000,00
24/12/2014	0078/BenPen-Huragi/XII/2014	1.765.000,00
29/12/2014	0059/BenPen-Lubuk Barumun/XII/2014	1.070.000,00
29/12/2014	0158/Benpen-Ulu Barumun/XII/2014	365.000,00
07/01/2014	0001/Benpen-DPKA/I/2014	780.500,00
09/01/2014	0004/Benpen-DPKA/I/2014	1.440.000,00
09/01/2014	0005/Benpen-DPKA/I/2014	1.500.000,00
09/01/2014	0006/Benpen-DPKA/I/2014	1.440.000,00
09/01/2014	0007/Benpen-DPKA/I/2014	3.600.000,00
09/01/2014	0008/Benpen-DPKA/I/2014	900.000,00
09/01/2014	0009/Benpen-DPKA/I/2014	960.000,00
13/01/2014	0010/Benpen-DPKA/I/2014	109.650,00
13/01/2014	0011/Benpen-DPKA/I/2014	102.000,00
13/01/2014	0012/Benpen-DPKA/I/2014	114.750,00
13/01/2014	0013/Benpen-DPKA/I/2014	114.750,00
21/01/2014	0014/Benpen-DPKA/I/2014	480.000,00
23/01/2014	0015/Benpen-DPKA/I/2014	203.800,00
23/01/2014	0016/Benpen-DPKA/I/2014	195.000,00
23/01/2014	0017/Benpen-DPKA/I/2014	123.750,00
23/01/2014	0018/Benpen-DPKA/I/2014	139.500,00
23/01/2014	0019/Benpen-DPKA/I/2014	157.500,00
23/01/2014	0020/Benpen-DPKA/I/2014	132.750,00
23/01/2014	0021/Benpen-DPKA/I/2014	112.500,00
23/01/2014	0022/Benpen-DPKA/I/2014	168.750,00
23/01/2014	0023/Benpen-DPKA/I/2014	180.000,00
23/01/2014	0024/Benpen-DPKA/I/2014	146.250,00
23/01/2014	0025/Benpen-DPKA/I/2014	157.500,00
23/01/2014	0026/Benpen-DPKA/I/2014	225.000,00
23/01/2014	0027/Benpen-DPKA/I/2014	274.500,00
23/01/2014	0028/Benpen-DPKA/I/2014	112.500,00
23/01/2014	0029/Benpen-DPKA/I/2014	112.500,00
23/01/2014	0030/Benpen-DPKA/I/2014	101.250,00
23/01/2014	0031/Benpen-DPKA/I/2014	123.750,00
23/01/2014	0032/Benpen-DPKA/I/2014	180.000,00
23/01/2014	0033/Benpen-DPKA/I/2014	146.250,00
23/01/2014	0034/Benpen-DPKA/I/2014	450.000,00
23/01/2014	0035/Benpen-DPKA/I/2014	271.000,00
23/01/2014	0036/Benpen-DPKA/I/2014	286.100,00
23/01/2014	0037/Benpen-DPKA/I/2014	200.000,00
23/01/2014	0038/Benpen-DPKA/I/2014	172.000,00

4 . 1 . 1 . 02 .
22

Rumah Makan

686.347.095,00



23/01/2014	0039/Benpen-DPKA/I/2014	165.000,00
23/01/2014	0040/Benpen-DPKA/I/2014	165.000,00
24/02/2014	0051/Benpen-DPKA/II/2014	125.000,00
24/02/2014	0052/Benpen-DPKA/II/2014	680.000,00
26/02/2014	0053/Benpen-DPKA/II/2014	2.997.800,00
26/02/2014	0054/Benpen-DPKA/II/2014	4.669.000,00
27/02/2014	0055/Benpen-DPKA/II/2014	230.000,00
27/02/2014	0056/Benpen-DPKA/II/2014	376.500,00
27/02/2014	0057/Benpen-DPKA/II/2014	770.000,00
27/02/2014	0058/Benpen-DPKA/II/2014	623.500,00
27/02/2014	0059/Benpen-DPKA/II/2014	1.400.000,00
27/02/2014	0060/Benpen-DPKA/II/2014	1.200.000,00
07/03/2014	0062/Benpen-DPKA/III/2014	64.000,00
07/03/2014	0063/Benpen-DPKA/III/2014	61.000,00
11/03/2014	0067/Benpen-DPKA/III/2014	157.500,00
11/03/2014	0068/Benpen-DPKA/III/2014	119.000,00
11/03/2014	0069/Benpen-DPKA/III/2014	108.800,00
11/03/2014	0070/Benpen-DPKA/III/2014	108.800,00
11/03/2014	0071/Benpen-DPKA/III/2014	510.000,00
11/03/2014	0072/Benpen-DPKA/III/2014	145.000,00
12/03/2014	0073/Benpen-DPKA/III/2014	2.142.000,00
12/03/2014	0074/Benpen-DPKA/III/2014	247.500,00
12/03/2014	0075/Benpen-DPKA/III/2014	13.905.600,00
12/03/2014	0076/Benpen-DPKA/III/2014	375.000,00
12/03/2014	0077/Benpen-DPKA/III/2014	5.987.500,00
12/03/2014	0078/Benpen-DPKA/III/2014	45.000,00
12/03/2014	0079/Benpen-DPKA/III/2014	679.500,00
12/03/2014	0080/Benpen-DPKA/III/2014	496.000,00
13/03/2014	0081/Benpen-DPKA/III/2014	225.000,00
14/03/2014	0082/Benpen-DPKA/III/2014	300.700,00
17/03/2014	0083/Benpen-DPKA/III/2014	679.500,00
17/03/2014	0084/Benpen-DPKA/III/2014	427.500,00
18/03/2014	0085/Benpen-DPKA/III/2014	1.020.000,00
18/03/2014	0086/Benpen-DPKA/III/2014	135.000,00
18/03/2014	0087/Benpen-DPKA/III/2014	1.020.000,00
19/03/2014	0088/Benpen-DPKA/III/2014	1.583.500,00
19/03/2014	0089/Benpen-DPKA/III/2014	680.000,00
19/03/2014	0090/Benpen-DPKA/III/2014	1.500.000,00
19/03/2014	0091/Benpen-DPKA/III/2014	593.400,00
20/03/2014	0092/Benpen-DPKA/III/2014	999.400,00
20/03/2014	0093/Benpen-DPKA/III/2014	695.000,00
21/03/2014	0094/Benpen-DPKA/III/2014	1.009.000,00
21/03/2014	0095/Benpen-DPKA/III/2014	989.000,00
21/03/2014	0096/Benpen-DPKA/III/2014	179.000,00
21/03/2014	0097/Benpen-DPKA/III/2014	119.000,00
21/03/2014	0098/Benpen-DPKA/III/2014	157.500,00
21/03/2014	0099/Benpen-DPKA/III/2014	42.900,00
26/03/2014	0101/Benpen-DPKA/III/2014	13.050.000,00
26/03/2014	0102/Benpen-DPKA/III/2014	50.000,00
26/03/2014	0103/Benpen-DPKA/III/2014	93.000,00
26/03/2014	0104/Benpen-DPKA/III/2014	57.000,00
26/03/2014	0105/Benpen-DPKA/III/2014	340.000,00
27/03/2014	0106/Benpen-DPKA/III/2014	1.974.500,00
28/03/2014	0107/Benpen-DPKA/III/2014	276.000,00
28/03/2014	0108/Benpen-DPKA/III/2014	900.000,00
01/04/2014	0118/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0119/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0120/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0121/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0122/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0123/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0124/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0125/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00

01/04/2014	0126/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0127/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0128/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
01/04/2014	0129/Benpen-DPKA/IV/2014	70.000,00
02/04/2014	0130/Benpen-DPKA/IV/2014	1.200.000,00
03/04/2014	0131/Benpen-DPKA/IV/2014	2.414.200,00
03/04/2014	0132/Benpen-DPKA/IV/2014	1.995.000,00
07/04/2014	0133/Benpen-DPKA/IV/2014	770.000,00
07/04/2014	0134/Benpen-DPKA/IV/2014	140.000,00
07/04/2014	0135/Benpen-DPKA/IV/2014	1.303.700,00
07/04/2014	0136/Benpen-DPKA/IV/2014	1.208.000,00
07/04/2014	0137/Benpen-DPKA/IV/2014	1.020.400,00
07/04/2014	0138/Benpen-DPKA/IV/2014	52.500,00
08/04/2014	0139/Benpen-DPKA/IV/2014	510.000,00
10/04/2014	0141/Benpen-DPKA/IV/2014	6.632.500,00
11/04/2014	0142/Benpen-DPKA/IV/2014	406.000,00
14/04/2014	0143/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0144/Benpen-DPKA/IV/2014	121.000,00
14/04/2014	0145/Benpen-DPKA/IV/2014	289.000,00
14/04/2014	0146/Benpen-DPKA/IV/2014	573.000,00
14/04/2014	0147/Benpen-DPKA/IV/2014	1.500.000,00
14/04/2014	0148/Benpen-DPKA/IV/2014	402.000,00
14/04/2014	0149/Benpen-DPKA/IV/2014	822.000,00
14/04/2014	0150/Benpen-DPKA/IV/2014	112.000,00
14/04/2014	0151/Benpen-DPKA/IV/2014	364.000,00
14/04/2014	0152/Benpen-DPKA/IV/2014	241.000,00
14/04/2014	0153/Benpen-DPKA/IV/2014	235.000,00
14/04/2014	0154/Benpen-DPKA/IV/2014	518.000,00
14/04/2014	0155/Benpen-DPKA/IV/2014	1.326.000,00
14/04/2014	0156/Benpen-DPKA/IV/2014	981.000,00
14/04/2014	0157/Benpen-DPKA/IV/2014	2.088.000,00
14/04/2014	0158/Benpen-DPKA/IV/2014	441.000,00
14/04/2014	0159/Benpen-DPKA/IV/2014	1.029.000,00
14/04/2014	0160/Benpen-DPKA/IV/2014	224.000,00
14/04/2014	0161/Benpen-DPKA/IV/2014	279.000,00
14/04/2014	0162/Benpen-DPKA/IV/2014	221.000,00
14/04/2014	0163/Benpen-DPKA/IV/2014	635.000,00
14/04/2014	0164/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0165/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0166/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0167/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0168/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0169/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0170/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0171/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0172/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0173/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0174/Benpen-DPKA/IV/2014	60.000,00
14/04/2014	0175/Benpen-DPKA/IV/2014	795.000,00
14/04/2014	0176/Benpen-DPKA/IV/2014	891.000,00
14/04/2014	0177/Benpen-DPKA/IV/2014	795.000,00
14/04/2014	0178/Benpen-DPKA/IV/2014	1.905.000,00
14/04/2014	0179/Benpen-DPKA/IV/2014	1.788.000,00
14/04/2014	0180/Benpen-DPKA/IV/2014	600.000,00
15/04/2014	0181/Benpen-DPKA/IV/2014	400.000,00
15/04/2014	0182/Benpen-DPKA/IV/2014	500.000,00
15/04/2014	0183/Benpen-DPKA/IV/2014	372.500,00
15/04/2014	0184/Benpen-DPKA/IV/2014	227.500,00
15/04/2014	0185/Benpen-DPKA/IV/2014	500.000,00
15/04/2014	0186/Benpen-DPKA/IV/2014	12.891.400,00
16/04/2014	0187/Benpen-DPKA/IV/2014	595.000,00
17/04/2014	0192/Benpen-DPKA/IV/2014	74.000,00
17/04/2014	0193/Benpen-DPKA/IV/2014	74.000,00

22/04/2014	0200/Benpen-DPKA/IV/2014	206.250,00
23/04/2014	0201/Benpen-DPKA/IV/2014	408.000,00
24/04/2014	0202/Benpen-DPKA/IV/2014	272.000,00
24/04/2014	0203/Benpen-DPKA/IV/2014	680.000,00
28/04/2014	0199/Benpen-DPKA/IV/2014	14.961.000,00
29/04/2014	0204/Benpen-DPKA/IV/2014	223.500,00
29/04/2014	0205/Benpen-DPKA/IV/2014	1.075.250,00
29/04/2014	0206/Benpen-DPKA/IV/2014	281.250,00
06/05/2014	0208/Benpen-DPKA/V/2014	139.800,00
06/05/2014	0209/Benpen-DPKA/V/2014	122.700,00
06/05/2014	0210/Benpen-DPKA/V/2014	117.500,00
06/05/2014	0211/Benpen-DPKA/V/2014	103.000,00
06/05/2014	0212/Benpen-DPKA/V/2014	106.000,00
07/05/2014	0214/Benpen-DPKA/V/2014	550.500,00
08/05/2014	0215/Benpen-DPKA/V/2014	1.467.200,00
08/05/2014	0216/Benpen-DPKA/V/2014	749.400,00
09/05/2014	0217/Benpen-DPKA/V/2014	365.000,00
13/05/2014	0218/Benpen-DPKA/V/2014	1.125.000,00
14/05/2014	0219/Benpen-DPKA/V/2014	975.500,00
14/05/2014	0220/Benpen-DPKA/V/2014	1.382.000,00
16/05/2014	0221/Benpen-DPKA/V/2014	271.500,00
16/05/2014	0222/Benpen-DPKA/V/2014	228.500,00
16/05/2014	0223/Benpen-DPKA/V/2014	442.000,00
19/05/2014	0224/Benpen-DPKA/V/2014	9.000.000,00
21/05/2014	0225/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0226/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0227/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0228/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0229/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0230/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0231/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0232/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0233/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0234/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0235/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0236/Benpen-DPKA/V/2014	70.000,00
21/05/2014	0237/Benpen-DPKA/V/2014	519.800,00
22/05/2014	0238/Benpen-DPKA/V/2014	3.150.000,00
22/05/2014	0239/Benpen-DPKA/V/2014	2.800.000,00
22/05/2014	0240/Benpen-DPKA/V/2014	2.100.000,00
22/05/2014	0241/Benpen-DPKA/V/2014	1.750.000,00
22/05/2014	0242/Benpen-DPKA/V/2014	455.000,00
22/05/2014	0243/Benpen-DPKA/V/2014	425.000,00
22/05/2014	0244/Benpen-DPKA/V/2014	551.000,00
22/05/2014	0245/Benpen-DPKA/V/2014	10.593.500,00
22/05/2014	0246/Benpen-DPKA/V/2014	637.500,00
22/05/2014	0247/Benpen-DPKA/V/2014	360.000,00
22/05/2014	0248/Benpen-DPKA/V/2014	330.000,00
23/05/2014	0249/Benpen-DPKA/V/2014	861.300,00
26/05/2014	0250/Benpen-DPKA/V/2014	142.000,00
26/05/2014	0251/Benpen-DPKA/V/2014	235.000,00
26/05/2014	0252/Benpen-DPKA/V/2014	248.000,00
26/05/2014	0253/Benpen-DPKA/V/2014	261.000,00
26/05/2014	0254/Benpen-DPKA/V/2014	120.500,00
26/05/2014	0255/Benpen-DPKA/V/2014	145.000,00
26/05/2014	0256/Benpen-DPKA/V/2014	132.000,00
30/05/2014	0257/Benpen-DPKA/V/2014	240.000,00
02/06/2014	0258/Benpen-DPKA/VI/2014	221.000,00
02/06/2014	0259/Benpen-DPKA/VI/2014	221.000,00
02/06/2014	0260/Benpen-DPKA/VI/2014	221.000,00
03/06/2014	0261/Benpen-DPKA/VI/2014	507.000,00
05/06/2014	0263/Benpen-DPKA/VI/2014	240.800,00
05/06/2014	0264/Benpen-DPKA/VI/2014	250.000,00

05/06/2014	0265/Benpen-DPKA/VI/2014	1.376.000,00
05/06/2014	0266/Benpen-DPKA/VI/2014	800.000,00
05/06/2014	0267/Benpen-DPKA/VI/2014	288.000,00
05/06/2014	0268/Benpen-DPKA/VI/2014	288.000,00
05/06/2014	0269/Benpen-DPKA/VI/2014	430.000,00
05/06/2014	0270/Benpen-DPKA/VI/2014	430.000,00
05/06/2014	0271/Benpen-DPKA/VI/2014	567.600,00
09/06/2014	0272/Benpen-DPKA/VI/2014	150.000,00
09/06/2014	0273/Benpen-DPKA/VI/2014	1.632.900,00
09/06/2014	0274/Benpen-DPKA/VI/2014	634.000,00
11/06/2014	0275/Benpen-DPKA/VI/2014	100.000,00
12/06/2014	0277/Benpen-DPKA/VI/2014	500.000,00
16/06/2014	0289/Benpen-DPKA/VI/2014	204.500,00
16/06/2014	0290/Benpen-DPKA/VI/2014	101.500,00
16/06/2014	0291/Benpen-DPKA/VI/2014	103.000,00
17/06/2014	0297/Benpen-DPKA/VI/2014	798.000,00
17/06/2014	0298/Benpen-DPKA/VI/2014	707.000,00
17/06/2014	0299/Benpen-DPKA/VI/2014	249.900,00
17/06/2014	0300/Benpen-DPKA/VI/2014	400.000,00
17/06/2014	0301/Benpen-DPKA/VI/2014	280.000,00
18/06/2014	0302/Benpen-DPKA/VI/2014	162.000,00
18/06/2014	0303/Benpen-DPKA/VI/2014	677.800,00
18/06/2014	0304/Benpen-DPKA/VI/2014	45.600,00
20/06/2014	0312/Benpen-DPKA/VI/2014	2.999.500,00
20/06/2014	0313/Benpen-DPKA/VI/2014	724.500,00
20/06/2014	0314/Benpen-DPKA/VI/2014	6.000,00
24/06/2014	0320/Benpen-DPKA/VI/2014	975.000,00
24/06/2014	0321/Benpen-DPKA/VI/2014	70.000,00
24/06/2014	0322/Benpen-DPKA/VI/2014	70.000,00
24/06/2014	0323/Benpen-DPKA/VI/2014	595.100,00
25/06/2014	0324/Benpen-DPKA/VI/2014	1.056.500,00
26/06/2014	0325/Benpen-DPKA/VI/2014	225.000,00
26/06/2014	0326/Benpen-DPKA/VI/2014	206.250,00
26/06/2014	0327/Benpen-DPKA/VI/2014	168.750,00
30/06/2014	0329/Benpen-DPKA/VI/2014	499.500,00
01/07/2014	0330/Benpen-DPKA/VII/2014	101.500,00
01/07/2014	0331/Benpen-DPKA/VII/2014	6.305.000,00
01/07/2014	0332/Benpen-DPKA/VII/2014	634.400,00
01/07/2014	0333/Benpen-DPKA/VII/2014	330.000,00
01/07/2014	0334/Benpen-DPKA/VII/2014	355.200,00
02/07/2014	0335/Benpen-DPKA/VII/2014	1.019.250,00
03/07/2014	0336/Benpen-DPKA/VII/2014	700.000,00
03/07/2014	0337/Benpen-DPKA/VII/2014	240.000,00
04/07/2014	0338/Benpen-DPKA/VII/2014	1.173.000,00
04/07/2014	0339/Benpen-DPKA/VII/2014	984.000,00
04/07/2014	0341/Benpen-DPKA/VII/2014	1.197.500,00
04/07/2014	0342/Benpen-DPKA/VII/2014	120.000,00
07/07/2014	0343/Benpen-DPKA/VII/2014	120.000,00
08/07/2014	0345/Benpen-DPKA/VII/2014	221.000,00
08/07/2014	0346/Benpen-DPKA/VII/2014	221.000,00
08/07/2014	0347/Benpen-DPKA/VII/2014	221.000,00
08/07/2014	0348/Benpen-DPKA/VII/2014	1.156.000,00
08/07/2014	0349/Benpen-DPKA/VII/2014	165.000,00
08/07/2014	0350/Benpen-DPKA/VII/2014	412.500,00
08/07/2014	0351/Benpen-DPKA/VII/2014	213.800,00
10/07/2014	0352/Benpen-DPKA/VII/2014	644.000,00
14/07/2014	0353/Benpen-DPKA/VII/2014	385.000,00
14/07/2014	0355/Benpen-DPKA/VII/2014	22.000,00
15/07/2014	0355.A/Benpen-DPKA/VII/2014	144.000,00
15/07/2014	0355.B/Benpen-DPKA/VII/2014	144.000,00
15/07/2014	0355.C/Benpen-DPKA/VII/2014	144.000,00
16/07/2014	0356/Benpen-DPKA/VII/2014	482.500,00
16/07/2014	0357/Benpen-DPKA/VII/2014	494.000,00

16/07/2014	0358/Benpen-DPKA/VII/2014	1.500.000,00
16/07/2014	0359/Benpen-DPKA/VII/2014	447.500,00
16/07/2014	0360/Benpen-DPKA/VII/2014	1.045.000,00
16/07/2014	0361/Benpen-DPKA/VII/2014	955.000,00
16/07/2014	0362/Benpen-DPKA/VII/2014	494.000,00
16/07/2014	0363/Benpen-DPKA/VII/2014	460.000,00
16/07/2014	0364/Benpen-DPKA/VII/2014	497.500,00
16/07/2014	0365/Benpen-DPKA/VII/2014	1.694.500,00
16/07/2014	0366/Benpen-DPKA/VII/2014	774.800,00
17/07/2014	0367/Benpen-DPKA/VII/2014	397.000,00
17/07/2014	0368/Benpen-DPKA/VII/2014	7.008.000,00
17/07/2014	0369/Benpen-DPKA/VII/2014	2.855.750,00
17/07/2014	0370/Benpen-DPKA/VII/2014	680.000,00
18/07/2014	0371/Benpen-DPKA/VII/2014	2.228.100,00
21/07/2014	0372/Benpen-DPKA/VII/2014	273.750,00
21/07/2014	0373/Benpen-DPKA/VII/2014	387.000,00
21/07/2014	0374/Benpen-DPKA/VII/2014	770.000,00
21/07/2014	0375/Benpen-DPKA/VII/2014	140.000,00
21/07/2014	0376/Benpen-DPKA/VII/2014	70.000,00
21/07/2014	0377/Benpen-DPKA/VII/2014	1.374.500,00
21/07/2014	0378/Benpen-DPKA/VII/2014	510.000,00
22/07/2014	0379/Benpen-DPKA/VII/2014	67.500,00
22/07/2014	0380/Benpen-DPKA/VII/2014	45.000,00
22/07/2014	0381/Benpen-DPKA/VII/2014	100.000,00
24/07/2014	0384/Benpen-DPKA/VII/2014	49.300,00
24/07/2014	0385/Benpen-DPKA/VII/2014	242.500,00
25/07/2014	0386/Benpen-DPKA/VII/2014	1.169.250,00
07/08/2014	0387/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.509.200,00
07/08/2014	0388/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.428.000,00
07/08/2014	0389/Benpen-DPKA/VIII/2014	800.000,00
07/08/2014	0390/Benpen-DPKA/VIII/2014	718.700,00
07/08/2014	0391/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.423.700,00
07/08/2014	0392/Benpen-DPKA/VIII/2014	600.000,00
07/08/2014	0393/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.196.000,00
08/08/2014	0395/Benpen-DPKA/VIII/2014	122.727,00
08/08/2014	0396/Benpen-DPKA/VIII/2014	227.273,00
08/08/2014	0397/Benpen-DPKA/VIII/2014	90.000,00
13/08/2014	0398/Benpen-DPKA/VIII/2014	442.000,00
13/08/2014	0399/Benpen-DPKA/VIII/2014	108.800,00
13/08/2014	0400/Benpen-DPKA/VIII/2014	77.300,00
13/08/2014	0401/Benpen-DPKA/VIII/2014	405.000,00
14/08/2014	0402/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.395.000,00
15/08/2014	0403/Benpen-DPKA/VIII/2014	35.000,00
18/08/2014	0404/Benpen-DPKA/VIII/2014	395.200,00
18/08/2014	0405/Benpen-DPKA/VIII/2014	203.000,00
20/08/2014	0406/Benpen-DPKA/VIII/2014	935.000,00
20/08/2014	0407/Benpen-DPKA/VIII/2014	400.000,00
20/08/2014	0408/Benpen-DPKA/VIII/2014	245.000,00
20/08/2014	0409/Benpen-DPKA/VIII/2014	340.000,00
20/08/2014	0410/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.650.000,00
20/08/2014	0411/Benpen-DPKA/VIII/2014	136.000,00
21/08/2014	0414/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.659.250,00
21/08/2014	0415/Benpen-DPKA/VIII/2014	30.967.500,00
22/08/2014	0416/Benpen-DPKA/VIII/2014	510.000,00
22/08/2014	0417/Benpen-DPKA/VIII/2014	476.000,00
22/08/2014	0418/Benpen-DPKA/VIII/2014	340.000,00
22/08/2014	0419/Benpen-DPKA/VIII/2014	74.000,00
22/08/2014	0420/Benpen-DPKA/VIII/2014	74.000,00
25/08/2014	0421/Benpen-DPKA/VIII/2014	165.000,00
25/08/2014	0422/Benpen-DPKA/VIII/2014	225.000,00
26/08/2014	0426/Benpen-DPKA/VIII/2014	339.750,00
26/08/2014	0427/Benpen-DPKA/VIII/2014	135.000,00
27/08/2014	0428/Benpen-DPKA/VIII/2014	87.500,00

28/08/2014	0430/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.360.000,00
28/08/2014	0431/Benpen-DPKA/VIII/2014	108.000,00
28/08/2014	0432/Benpen-DPKA/VIII/2014	108.000,00
28/08/2014	0433/Benpen-DPKA/VIII/2014	1.417.500,00
29/08/2014	0434/Benpen-DPKA/VIII/2014	294.000,00
29/08/2014	0435/Benpen-DPKA/VIII/2014	105.000,00
01/09/2014	0438/Benpen-DPKA/IX/2014	580.000,00
03/09/2014	0442/Benpen-DPKA/IX/2014	349.500,00
03/09/2014	0443/Benpen-DPKA/IX/2014	989.400,00
03/09/2014	0446/Benpen-DPKA/IX/2014	689.200,00
04/09/2014	0447/Benpen-DPKA/IX/2014	497.000,00
05/09/2014	0448/Benpen-DPKA/IX/2014	270.000,00
05/09/2014	0449/Benpen-DPKA/IX/2014	230.000,00
05/09/2014	0450/Benpen-DPKA/IX/2014	250.000,00
05/09/2014	0451/Benpen-DPKA/IX/2014	196.000,00
05/09/2014	0452/Benpen-DPKA/IX/2014	304.000,00
05/09/2014	0453/Benpen-DPKA/IX/2014	500.000,00
05/09/2014	0454/Benpen-DPKA/IX/2014	489.500,00
05/09/2014	0455/Benpen-DPKA/IX/2014	540.500,00
09/09/2014	0463/Benpen-DPKA/IX/2014	500.000,00
09/09/2014	0464/Benpen-DPKA/IX/2014	680.000,00
09/09/2014	0465/Benpen-DPKA/IX/2014	168.750,00
09/09/2014	0466/Benpen-DPKA/IX/2014	168.750,00
09/09/2014	0467/Benpen-DPKA/IX/2014	157.500,00
09/09/2014	0468/Benpen-DPKA/IX/2014	146.250,00
09/09/2014	0469/Benpen-DPKA/IX/2014	135.000,00
09/09/2014	0470/Benpen-DPKA/IX/2014	123.750,00
09/09/2014	0471/Benpen-DPKA/IX/2014	416.000,00
09/09/2014	0472/Benpen-DPKA/IX/2014	483.000,00
09/09/2014	0473/Benpen-DPKA/IX/2014	663.000,00
09/09/2014	0474/Benpen-DPKA/IX/2014	391.000,00
09/09/2014	0475/Benpen-DPKA/IX/2014	560.000,00
09/09/2014	0476/Benpen-DPKA/IX/2014	960.000,00
09/09/2014	0477/Benpen-DPKA/IX/2014	126.500,00
09/09/2014	0478/Benpen-DPKA/IX/2014	169.000,00
10/09/2014	0479/Benpen-DPKA/IX/2014	1.112.500,00
10/09/2014	0480/Benpen-DPKA/IX/2014	720.000,00
11/09/2014	0481/Benpen-DPKA/IX/2014	81.600,00
15/09/2014	0486.A/Benpen-DPKA/IX/2014	679.500,00
16/09/2014	0487/Benpen-DPKA/IX/2014	879.000,00
16/09/2014	0488/Benpen-DPKA/IX/2014	400.000,00
16/09/2014	0489/Benpen-DPKA/IX/2014	18.378.550,00
18/09/2014	0491/Benpen-DPKA/IX/2014	1.545.454,00
18/09/2014	0493/Benpen-DPKA/IX/2014	449.400,00
24/09/2014	0496/Benpen-DPKA/IX/2014	100.000,00
24/09/2014	0497/Benpen-DPKA/IX/2014	100.000,00
24/09/2014	0498/Benpen-DPKA/IX/2014	600.000,00
26/09/2014	0499/Benpen-DPKA/IX/2014	1.416.000,00
29/09/2014	0500/Benpen-DPKA/IX/2014	1.022.000,00
29/09/2014	0501/Benpen-DPKA/IX/2014	1.195.300,00
30/09/2014	0502/Benpen-DPKA/IX/2014	165.000,00
30/09/2014	0503/Benpen-DPKA/IX/2014	210.000,00
01/10/2014	0504/Benpen-DPKA/X/2014	234.500,00
01/10/2014	0505/Benpen-DPKA/X/2014	430.000,00
01/10/2014	0506/Benpen-DPKA/X/2014	189.000,00
01/10/2014	0507/Benpen-DPKA/X/2014	5.000,00
01/10/2014	0508/Benpen-DPKA/X/2014	108.000,00
01/10/2014	0509/Benpen-DPKA/X/2014	408.000,00
01/10/2014	0510/Benpen-DPKA/X/2014	60.200,00
01/10/2014	0511/Benpen-DPKA/X/2014	408.000,00
01/10/2014	0512/Benpen-DPKA/X/2014	109.500,00
01/10/2014	0513/Benpen-DPKA/X/2014	156.000,00
01/10/2014	0514/Benpen-DPKA/X/2014	165.000,00

02/10/2014	0515/Benpen-DPKA/X/2014	2.534.700,00
06/10/2014	0516/Benpen-DPKA/X/2014	1.596.000,00
06/10/2014	0517/Benpen-DPKA/X/2014	154.546,00
06/10/2014	0518/Benpen-DPKA/X/2014	457.520,00
06/10/2014	0519/Benpen-DPKA/X/2014	119.000,00
08/10/2014	0520/Benpen-DPKA/X/2014	299.200,00
08/10/2014	0521/Benpen-DPKA/X/2014	102.000,00
09/10/2014	0523/Benpen-DPKA/X/2014	175.000,00
09/10/2014	0524/Benpen-DPKA/X/2014	7.742.000,00
09/10/2014	0525/Benpen-DPKA/X/2014	123.500,00
10/10/2014	0526/Benpen-DPKA/X/2014	650.250,00
10/10/2014	0527/Benpen-DPKA/X/2014	4.910.000,00
10/10/2014	0528/Benpen-DPKA/X/2014	1.124.400,00
13/10/2014	0529/Benpen-DPKA/X/2014	1.766.500,00
17/10/2014	0534/Benpen-DPKA/X/2014	67.500,00
17/10/2014	0535/Benpen-DPKA/X/2014	837.500,00
17/10/2014	0536/Benpen-DPKA/X/2014	275.400,00
17/10/2014	0537/Benpen-DPKA/X/2014	190.400,00
17/10/2014	0538/Benpen-DPKA/X/2014	76.600,00
20/10/2014	0539/Benpen-DPKA/X/2014	50.000,00
20/10/2014	0540/Benpen-DPKA/X/2014	1.270.000,00
20/10/2014	0541/Benpen-DPKA/X/2014	1.170.000,00
20/10/2014	0542/Benpen-DPKA/X/2014	340.000,00
20/10/2014	0543/Benpen-DPKA/X/2014	340.000,00
20/10/2014	0544/Benpen-DPKA/X/2014	340.000,00
20/10/2014	0545/Benpen-DPKA/X/2014	1.604.250,00
20/10/2014	0546/Benpen-DPKA/X/2014	940.000,00
20/10/2014	0547/Benpen-DPKA/X/2014	125.000,00
20/10/2014	0548/Benpen-DPKA/X/2014	45.000,00
20/10/2014	0549/Benpen-DPKA/X/2014	90.000,00
20/10/2014	0550/Benpen-DPKA/X/2014	180.000,00
20/10/2014	0551/Benpen-DPKA/X/2014	250.000,00
20/10/2014	0552/Benpen-DPKA/X/2014	125.000,00
20/10/2014	0553/Benpen-DPKA/X/2014	250.000,00
20/10/2014	0554/Benpen-DPKA/X/2014	45.000,00
21/10/2014	0555/Benpen-DPKA/X/2014	987.000,00
21/10/2014	0557/Benpen-DPKA/X/2014	189.000,00
21/10/2014	0558/Benpen-DPKA/X/2014	75.000,00
21/10/2014	0559/Benpen-DPKA/X/2014	232.000,00
22/10/2014	0561/Benpen-DPKA/X/2014	280.000,00
22/10/2014	0562/Benpen-DPKA/X/2014	280.000,00
22/10/2014	0563/Benpen-DPKA/X/2014	1.000.000,00
22/10/2014	0564/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0565/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0566/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0567/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0568/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0569/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0570/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0571/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0572/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0573/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0574/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0575/Benpen-DPKA/X/2014	35.000,00
22/10/2014	0576/Benpen-DPKA/X/2014	1.359.200,00
22/10/2014	0577/Benpen-DPKA/X/2014	679.700,00
22/10/2014	0579/Benpen-DPKA/X/2014	975.000,00
22/10/2014	0580/Benpen-DPKA/X/2014	270.000,00
22/10/2014	0581/Benpen-DPKA/X/2014	212.000,00
22/10/2014	0582/Benpen-DPKA/X/2014	252.000,00
22/10/2014	0583/Benpen-DPKA/X/2014	181.436,00
22/10/2014	0584/Benpen-DPKA/X/2014	114.364,00
23/10/2014	0585/Benpen-DPKA/X/2014	500.000,00

24/10/2014	0586/Benpen-DPKA/X/2014	150.000,00
24/10/2014	0587/Benpen-DPKA/X/2014	150.000,00
24/10/2014	0588/Benpen-DPKA/X/2014	136.500,00
24/10/2014	0591/Benpen-DPKA/X/2014	2.100.000,00
24/10/2014	0592/Benpen-DPKA/X/2014	2.800.000,00
24/10/2014	0593/Benpen-DPKA/X/2014	82.500,00
24/10/2014	0594/Benpen-DPKA/X/2014	997.200,00
24/10/2014	0595/Benpen-DPKA/X/2014	3.150.000,00
24/10/2014	0596/Benpen-DPKA/X/2014	1.750.000,00
27/10/2014	0597/Benpen-DPKA/X/2014	151.500,00
27/10/2014	0598/Benpen-DPKA/X/2014	165.000,00
27/10/2014	0599/Benpen-DPKA/X/2014	1.405.000,00
27/10/2014	0600/Benpen-DPKA/X/2014	300.000,00
29/10/2014	0601/Benpen-DPKA/X/2014	160.000,00
30/10/2014	0602/Benpen-DPKA/X/2014	150.000,00
30/10/2014	0603/Benpen-DPKA/X/2014	136.300,00
30/10/2014	0605/Benpen-DPKA/X/2014	340.000,00
04/11/2014	0606/Benpen-DPKA/XI/2014	353.000,00
04/11/2014	0607/Benpen-DPKA/XI/2014	1.347.250,00
06/11/2014	0609/Benpen-DPKA/XI/2014	430.000,00
06/11/2014	0610/Benpen-DPKA/XI/2014	2.243.500,00
06/11/2014	0611/Benpen-DPKA/XI/2014	600.000,00
06/11/2014	0612/Benpen-DPKA/XI/2014	1.213.300,00
07/11/2014	0613/Benpen-DPKA/XI/2014	2.280.000,00
07/11/2014	0614/Benpen-DPKA/XI/2014	589.000,00
07/11/2014	0615/Benpen-DPKA/XI/2014	859.600,00
07/11/2014	0616/Benpen-DPKA/XI/2014	3.500.000,00
07/11/2014	0617/Benpen-DPKA/XI/2014	1.120.000,00
07/11/2014	0618/Benpen-DPKA/XI/2014	250.000,00
07/11/2014	0619/Benpen-DPKA/XI/2014	859.600,00
07/11/2014	0620/Benpen-DPKA/XI/2014	664.100,00
07/11/2014	0621/Benpen-DPKA/XI/2014	350.000,00
07/11/2014	0622/Benpen-DPKA/XI/2014	614.000,00
07/11/2014	0623/Benpen-DPKA/XI/2014	212.000,00
07/11/2014	0624/Benpen-DPKA/XI/2014	200.000,00
07/11/2014	0625/Benpen-DPKA/XI/2014	1.140.000,00
11/11/2014	0626/Benpen-DPKA/XI/2014	16.683.100,00
11/11/2014	0632/Benpen-DPKA/XI/2014	680.000,00
12/11/2014	0633/Benpen-DPKA/XI/2014	157.500,00
12/11/2014	0634/Benpen-DPKA/XI/2014	168.750,00
12/11/2014	0635/Benpen-DPKA/XI/2014	112.500,00
12/11/2014	0636/Benpen-DPKA/XI/2014	150.000,00
12/11/2014	0637/Benpen-DPKA/XI/2014	168.750,00
12/11/2014	0638/Benpen-DPKA/XI/2014	157.500,00
12/11/2014	0639/Benpen-DPKA/XI/2014	135.000,00
12/11/2014	0640/Benpen-DPKA/XI/2014	146.750,00
12/11/2014	0641/Benpen-DPKA/XI/2014	210.000,00
12/11/2014	0642/Benpen-DPKA/XI/2014	381.000,00
12/11/2014	0643/Benpen-DPKA/XI/2014	240.000,00
12/11/2014	0644/Benpen-DPKA/XI/2014	414.000,00
12/11/2014	0645/Benpen-DPKA/XI/2014	2.975.000,00
12/11/2014	0646/Benpen-DPKA/XI/2014	3.325.000,00
12/11/2014	0647/Benpen-DPKA/XI/2014	2.243.500,00
14/11/2014	0648/Benpen-DPKA/XI/2014	1.080.000,00
14/11/2014	0649/Benpen-DPKA/XI/2014	922.000,00
14/11/2014	0650/Benpen-DPKA/XI/2014	50.000,00
14/11/2014	0651/Benpen-DPKA/XI/2014	118.000,00
17/11/2014	0652/Benpen-DPKA/XI/2014	200.000,00
17/11/2014	0653/Benpen-DPKA/XI/2014	300.000,00
18/11/2014	0654/Benpen-DPKA/XI/2014	23.000,00
19/11/2014	0655/Benpen-DPKA/XI/2014	2.216.100,00
20/11/2014	0656/Benpen-DPKA/XI/2014	389.500,00
20/11/2014	0657/Benpen-DPKA/XI/2014	1.399.500,00

24/11/2014	0659/Benpen-DPKA/XI/2014	1.207.500,00
24/11/2014	0660/Benpen-DPKA/XI/2014	1.160.000,00
25/11/2014	0661/Benpen-DPKA/XI/2014	1.032.000,00
26/11/2014	0662/Benpen-DPKA/XI/2014	1.619.500,00
26/11/2014	0663/Benpen-DPKA/XI/2014	1.080.000,00
26/11/2014	0664/Benpen-DPKA/XI/2014	11.999.200,00
26/11/2014	0665/Benpen-DPKA/XI/2014	1.185.300,00
26/11/2014	0666/Benpen-DPKA/XI/2014	1.300.000,00
28/11/2014	0667/Benpen-DPKA/XI/2014	166.500,00
28/11/2014	0668/Benpen-DPKA/XI/2014	915.000,00
28/11/2014	0669/Benpen-DPKA/XI/2014	270.000,00
28/11/2014	0670/Benpen-DPKA/XI/2014	297.000,00
28/11/2014	0672/Benpen-DPKA/XI/2014	845.000,00
28/11/2014	0673/Benpen-DPKA/XI/2014	1.117.300,00
28/11/2014	0674/Benpen-DPKA/XI/2014	645.000,00
28/11/2014	0675/Benpen-DPKA/XI/2014	481.600,00
01/12/2014	0676/Benpen-DPKA/XII/2014	221.000,00
01/12/2014	0677/Benpen-DPKA/XII/2014	679.900,00
01/12/2014	0678/Benpen-DPKA/XII/2014	262.500,00
01/12/2014	0679/Benpen-DPKA/XII/2014	221.000,00
01/12/2014	0680/Benpen-DPKA/XII/2014	221.000,00
01/12/2014	0681/Benpen-DPKA/XII/2014	221.000,00
01/12/2014	0682/Benpen-DPKA/XII/2014	221.000,00
03/12/2014	0683/Benpen-DPKA/XII/2014	680.000,00
03/12/2014	0684/Benpen-DPKA/XII/2014	175.000,00
04/12/2014	0685/Benpen-DPKA/XII/2014	350.000,00
04/12/2014	0686/Benpen-DPKA/XII/2014	720.000,00
04/12/2014	0687/Benpen-DPKA/XII/2014	2.040.000,00
04/12/2014	0688/Benpen-DPKA/XII/2014	1.650.000,00
04/12/2014	0689/Benpen-DPKA/XII/2014	3.310.000,00
08/12/2014	0690/Benpen-DPKA/XII/2014	1.079.250,00
08/12/2014	0691/Benpen-DPKA/XII/2014	502.500,00
08/12/2014	0692/Benpen-DPKA/XII/2014	105.000,00
08/12/2014	0693/Benpen-DPKA/XII/2014	600.000,00
08/12/2014	0694/Benpen-DPKA/XII/2014	170.000,00
08/12/2014	0695/Benpen-DPKA/XII/2014	425.000,00
08/12/2014	0696/Benpen-DPKA/XII/2014	340.000,00
09/12/2014	0697/Benpen-DPKA/XII/2014	146.250,00
09/12/2014	0698/Benpen-DPKA/XII/2014	146.250,00
10/12/2014	0703/Benpen-DPKA/XII/2014	308.600,00
11/12/2014	0704/Benpen-DPKA/XII/2014	1.225.000,00
11/12/2014	0705/Benpen-DPKA/XII/2014	412.500,00
11/12/2014	0706/Benpen-DPKA/XII/2014	540.000,00
11/12/2014	0707/Benpen-DPKA/XII/2014	455.000,00
11/12/2014	0708/Benpen-DPKA/XII/2014	2.020.000,00
11/12/2014	0709/Benpen-DPKA/XII/2014	280.500,00
12/12/2014	0710/Benpen-DPKA/XII/2014	2.095.000,00
12/12/2014	0711/Benpen-DPKA/XII/2014	1.376.000,00
12/12/2014	0712/Benpen-DPKA/XII/2014	70.000,00
12/12/2014	0713/Benpen-DPKA/XII/2014	900.000,00
12/12/2014	0714/Benpen-DPKA/XII/2014	130.000,00
15/12/2014	0716/Benpen-DPKA/XII/2014	100.000,00
15/12/2014	0717/Benpen-DPKA/XII/2014	32.000,00
16/12/2014	0718/Benpen-DPKA/XII/2014	90.000,00
16/12/2014	0719/Benpen-DPKA/XII/2014	135.000,00
16/12/2014	0720/Benpen-DPKA/XII/2014	50.000,00
16/12/2014	0721/Benpen-DPKA/XII/2014	801.400,00
18/12/2014	0722/Benpen-DPKA/XII/2014	398.700,00
18/12/2014	0723/Benpen-DPKA/XII/2014	16.830.000,00
18/12/2014	0724/Benpen-DPKA/XII/2014	270.000,00
18/12/2014	0725/Benpen-DPKA/XII/2014	4.602.300,00
18/12/2014	0726/Benpen-DPKA/XII/2014	680.000,00
19/12/2014	0727/Benpen-DPKA/XII/2014	90.000,00

19/12/2014	0728/Benpen-DPKA/XII/2014	45.000,00
19/12/2014	0729/Benpen-DPKA/XII/2014	180.000,00
19/12/2014	0730/Benpen-DPKA/XII/2014	90.000,00
19/12/2014	0731/Benpen-DPKA/XII/2014	90.000,00
19/12/2014	0732/Benpen-DPKA/XII/2014	125.000,00
19/12/2014	0733/Benpen-DPKA/XII/2014	425.000,00
19/12/2014	0734/Benpen-DPKA/XII/2014	500.000,00
19/12/2014	0735/Benpen-DPKA/XII/2014	250.000,00
22/12/2014	0736/Benpen-DPKA/XII/2014	840.000,00
22/12/2014	0737/Benpen-DPKA/XII/2014	840.000,00
22/12/2014	0738/Benpen-DPKA/XII/2014	867.000,00
22/12/2014	0739/Benpen-DPKA/XII/2014	867.000,00
22/12/2014	0740/Benpen-DPKA/XII/2014	150.000,00
22/12/2014	0741/Benpen-DPKA/XII/2014	137.000,00
22/12/2014	0742/Benpen-DPKA/XII/2014	700.000,00
22/12/2014	0743/Benpen-DPKA/XII/2014	612.000,00
22/12/2014	0744/Benpen-DPKA/XII/2014	1.135.600,00
22/12/2014	0745/Benpen-DPKA/XII/2014	299.250,00
22/12/2014	0746/Benpen-DPKA/XII/2014	451.500,00
22/12/2014	0747/Benpen-DPKA/XII/2014	193.500,00
22/12/2014	0748/Benpen-DPKA/XII/2014	1.125.000,00
22/12/2014	0749/Benpen-DPKA/XII/2014	330.000,00
23/12/2014	0750/Benpen-DPKA/XII/2014	150.000,00
23/12/2014	0751/Benpen-DPKA/XII/2014	280.000,00
23/12/2014	0752/Benpen-DPKA/XII/2014	160.000,00
23/12/2014	0753/Benpen-DPKA/XII/2014	193.500,00
23/12/2014	0754/Benpen-DPKA/XII/2014	150.000,00
23/12/2014	0755/Benpen-DPKA/XII/2014	516.000,00
23/12/2014	0756/Benpen-DPKA/XII/2014	1.023.750,00
23/12/2014	0757/Benpen-DPKA/XII/2014	99.000,00
23/12/2014	0758/Benpen-DPKA/XII/2014	184.500,00
23/12/2014	0759/Benpen-DPKA/XII/2014	494.500,00
23/12/2014	0760/Benpen-DPKA/XII/2014	602.000,00
23/12/2014	0761/Benpen-DPKA/XII/2014	680.000,00
23/12/2014	0762/Benpen-DPKA/XII/2014	215.000,00
23/12/2014	0763/Benpen-DPKA/XII/2014	510.000,00
23/12/2014	0764/Benpen-DPKA/XII/2014	2.201.500,00
24/12/2014	0765/Benpen-DPKA/XII/2014	1.672.900,00
24/12/2014	0766/Benpen-DPKA/XII/2014	129.000,00
24/12/2014	0767/Benpen-DPKA/XII/2014	163.000,00
24/12/2014	0768/Benpen-DPKA/XII/2014	1.845.000,00
24/12/2014	0769/Benpen-DPKA/XII/2014	499.200,00
24/12/2014	0770/Benpen-DPKA/XII/2014	129.000,00
24/12/2014	0771/Benpen-DPKA/XII/2014	163.000,00
24/12/2014	0772/Benpen-DPKA/XII/2014	141.500,00
24/12/2014	0773/Benpen-DPKA/XII/2014	299.250,00
24/12/2014	0774/Benpen-DPKA/XII/2014	275.000,00
24/12/2014	0775/Benpen-DPKA/XII/2014	216.000,00
24/12/2014	0776/Benpen-DPKA/XII/2014	36.000,00
24/12/2014	0777/Benpen-DPKA/XII/2014	900.000,00
24/12/2014	0778/Benpen-DPKA/XII/2014	150.000,00
24/12/2014	0780/Benpen-DPKA/XII/2014	206.250,00
24/12/2014	0781/Benpen-DPKA/XII/2014	294.500,00
24/12/2014	0782/Benpen-DPKA/XII/2014	300.000,00
24/12/2014	0783/Benpen-DPKA/XII/2014	1.782.000,00
24/12/2014	0784/Benpen-DPKA/XII/2014	544.000,00
24/12/2014	0785/Benpen-DPKA/XII/2014	748.000,00
24/12/2014	0786/Benpen-DPKA/XII/2014	209.000,00
24/12/2014	0787/Benpen-DPKA/XII/2014	680.000,00
29/12/2014	0788/Benpen-DPKA/XII/2014	243.750,00
29/12/2014	0789/Benpen-DPKA/XII/2014	131.250,00
29/12/2014	0790/Benpen-DPKA/XII/2014	82.500,00
29/12/2014	0791/Benpen-DPKA/XII/2014	393.750,00

29/12/2014	0792/Benpen-DPKA/XII/2014	223.150,00
29/12/2014	0793/Benpen-DPKA/XII/2014	250.000,00
29/12/2014	0794/Benpen-DPKA/XII/2014	275.000,00
29/12/2014	0795/Benpen-DPKA/XII/2014	204.000,00
29/12/2014	0796/Benpen-DPKA/XII/2014	2.380.000,00
29/12/2014	0797/Benpen-DPKA/XII/2014	3.400.000,00
29/12/2014	0798/Benpen-DPKA/XII/2014	204.000,00
29/12/2014	0801/Benpen-DPKA/XII/2014	10.651.000,00
29/12/2014	0802/Benpen-DPKA/XII/2014	4.816.500,00
29/12/2014	0803/Benpen-DPKA/XII/2014	5.999.300,00
29/12/2014	0804/Benpen-DPKA/XII/2014	808.400,00
29/12/2014	0805/Benpen-DPKA/XII/2014	395.000,00
29/12/2014	0806/Benpen-DPKA/XII/2014	720.000,00
29/12/2014	0807/Benpen-DPKA/XII/2014	1.270.000,00
29/12/2014	0808/Benpen-DPKA/XII/2014	951.000,00
29/12/2014	0809/Benpen-DPKA/XII/2014	629.000,00
29/12/2014	0810/Benpen-DPKA/XII/2014	510.000,00
29/12/2014	0811/Benpen-DPKA/XII/2014	441.750,00
29/12/2014	0812/Benpen-DPKA/XII/2014	357.000,00
29/12/2014	0813/Benpen-DPKA/XII/2014	303.000,00
29/12/2014	0815/Benpen-DPKA/XII/2014	3.998.400,00
30/12/2014	0816/Benpen-DPKA/XII/2014	8.417.975,00
30/12/2014	0817/Benpen-DPKA/XII/2014	698.000,00
30/12/2014	0818/Benpen-DPKA/XII/2014	700.000,00
30/12/2014	0819/Benpen-DPKA/XII/2014	10.080.000,00
30/12/2014	0820/Benpen-DPKA/XII/2014	535.000,00
30/12/2014	0822/Benpen-DPKA/XII/2014	1.145.000,00
30/12/2014	0823/Benpen-DPKA/XII/2014	1.905.000,00
30/12/2014	0824/Benpen-DPKA/XII/2014	938.500,00
30/12/2014	0825/Benpen-DPKA/XII/2014	204.000,00
30/12/2014	0826/Benpen-DPKA/XII/2014	204.000,00
30/12/2014	0827/Benpen-DPKA/XII/2014	3.792.700,00
30/12/2014	0828/Benpen-DPKA/XII/2014	202.800,00
30/12/2014	0829/Benpen-DPKA/XII/2014	5.470.000,00
30/12/2014	0830/Benpen-DPKA/XII/2014	5.481.000,00
30/12/2014	0831/Benpen-DPKA/XII/2014	1.000,00
30/12/2014	0832/Benpen-DPKA/XII/2014	879.500,00
30/12/2014	0833/Benpen-DPKA/XII/2014	204.000,00
30/12/2014	0834/Benpen-DPKA/XII/2014	210.000,00
30/12/2014	0835/Benpen-DPKA/XII/2014	429.300,00
30/12/2014	0836/Benpen-DPKA/XII/2014	1.000.000,00
30/12/2014	0837/Benpen-DPKA/XII/2014	1.043.000,00
30/12/2014	0838/Benpen-DPKA/XII/2014	319.700,00
30/12/2014	0840/Benpen-DPKA/XII/2014	203.000,00
30/12/2014	0841/Benpen-DPKA/XII/2014	34.800,00
30/12/2014	0842/Benpen-DPKA/XII/2014	34.800,00
30/12/2014	0843/Benpen-DPKA/XII/2014	400.000,00
30/12/2014	0844/Benpen-DPKA/XII/2014	119.000,00
30/12/2014	0845/Benpen-DPKA/XII/2014	200.000,00
31/12/2014	0846/Benpen-DPKA/XII/2014	320.000,00
31/12/2014	0847/Benpen-DPKA/XII/2014	67.500,00
31/12/2014	0848/Benpen-DPKA/XII/2014	900.000,00
31/12/2014	0849/Benpen-DPKA/XII/2014	40.000,00
31/12/2014	0850/Benpen-DPKA/XII/2014	840.000,00
31/12/2014	0851/Benpen-DPKA/XII/2014	13.500.000,00
31/12/2014	0852/Benpen-DPKA/XII/2014	7.800.000,00
31/12/2014	0853/Benpen-DPKA/XII/2014	456.000,00
31/12/2014	0854/Benpen-DPKA/XII/2014	199.500,00
31/12/2014	0855/Benpen-DPKA/XII/2014	173.250,00
31/12/2014	0856/Benpen-DPKA/XII/2014	180.000,00
31/12/2014	0857/Benpen-DPKA/XII/2014	168.750,00
31/12/2014	0858/Benpen-DPKA/XII/2014	165.000,00
31/12/2014	0859/Benpen-DPKA/XII/2014	174.750,00

31/12/2014	0860/Benpen-DPKA/XII/2014	206.250,00
31/12/2014	0861/Benpen-DPKA/XII/2014	195.000,00
31/12/2014	0862/Benpen-DPKA/XII/2014	202.500,00
31/12/2014	0863/Benpen-DPKA/XII/2014	195.750,00
31/12/2014	0864/Benpen-DPKA/XII/2014	125.000,00
31/12/2014	0865/Benpen-DPKA/XII/2014	110.000,00
31/12/2014	0866/Benpen-DPKA/XII/2014	150.000,00
31/12/2014	0867/Benpen-DPKA/XII/2014	420.000,00
31/12/2014	0868/Benpen-DPKA/XII/2014	416.250,00
31/12/2014	0869/Benpen-DPKA/XII/2014	300.000,00
31/12/2014	0870/Benpen-DPKA/XII/2014	160.000,00
31/12/2014	0871/Benpen-DPKA/XII/2014	500.000,00
31/12/2014	0872/Benpen-DPKA/XII/2014	325.000,00
31/12/2014	0873/Benpen-DPKA/XII/2014	160.000,00
31/12/2014	0874/Benpen-DPKA/XII/2014	250.000,00
31/12/2014	0875/Benpen-DPKA/XII/2014	181.000,00
31/12/2014	0876/Benpen-DPKA/XII/2014	510.000,00
31/12/2014	0877/Benpen-DPKA/XII/2014	75.000,00
31/12/2014	0878/Benpen-DPKA/XII/2014	1.190.000,00
31/12/2014	0879/Benpen-DPKA/XII/2014	479.000,00
31/12/2014	0880/Benpen-DPKA/XII/2014	224.000,00
31/12/2014	0881/Benpen-DPKA/XII/2014	204.000,00
31/12/2014	0882/Benpen-DPKA/XII/2014	81.600,00
31/12/2014	0883/Benpen-DPKA/XII/2014	156.000,00

11.979.000,00

